



**PENGARUH KOMPETENSI, SISTEM INFORMASI AKUNTANSI,
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN
DANA DESA**

(Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Jambi Luar Kota)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi sebagian dari Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh:

RIZAL HABI YUDA

NIM.C1C018052

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI**

2023

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Dengan ini Pembimbing Skripsi dan Ketua Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyatakan bahwa Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Rizal Habi Yuda
Nomor Mahasiswa : C1C018052
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa. (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Jambi Luar Kota).

Telah disetujui dan disahkan sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku dalam Ujian Komprehensif dan skripsi pada tanggal seperti tertera di bawah ini:

Jambi, Januari 2023

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pendamping

Dr. Rita Friyani, S.E., M.Si, CMGRCP

Fredy Olimsar, S.E., M.Si., CIQnR

NIP : 198007052005012003

NIP : 198809222019031006

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr.Hj.Fitrini Mansur,S.E.,M.Si.,CAAT

NIP :197311121998022002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Februari 2023
Jam : 10.30 -11.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. Mukhzarudfa, S.E., M.Si	_____
Penguji Utama	Dr. Yuliusman, SE., M.Si., Ak., CA., CIQnR	_____
Sekretaris	Gandy Wahyu Maulana Zulma, M.S., Ak., CGRM., CT.BNSP	_____
Anggota I	Dr. Rita Friyani, S.E., M.Si, CMGRCP	_____
Anggota II	Fredy Olimsar, S.E., M.Si., CIQnR	_____

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan Akuntansi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Enggar Diah Puspa Arum, S.E., M.Si.,

Ak., CA., CIQaR., CIQnR., CIT

NIP. 197610032000122001

Dr. H. Junaidi., S.E., M.Si

NIP. 196706021992031003

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizal Habi Yuda

NIM : C1C018052

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa. (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Jambi Luar Kota).

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi ini adalah karya asli penulis, selama proses penulisan penulis tidak melakukan kegiatan plagiat atas karya ilmiah orang lain, semua petikan yang saya ajukan dalam skripsi ini sesungguhnya ada dan disiapkan dengan kaedah ilmiah penulisan.
2. Apabila dikemudian hari didapati ketidaksesuaian sebagaimana yang tercantum dalam poin (1), maka saya siap menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya telah peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 22 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan

Rizal Habi Yuda
NIM. C1C018052

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pengaruh Kompetensi, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa.**” (Studi Empiris pada Desa Kecamatan Jambi Luar Kota).” Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berikut adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak.yang telah membantu dalam penyusunan hingga selesainya skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sutrisno, M. Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Jambi.
2. Bapak Dr. H. Junaidi, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Wakil Dekan BAKSI, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
3. Ibu Dr. Enggar Diah Puspa Arum, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
4. Bapak Dr. Rico Wijaya Z, S.E., M.M., M.Si., Ak. CIQnR selaku sekretaris jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
5. Ibu Dr. Fitriani Mansur, S.E., M.Si., CIQnR selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
6. Bapak Riski Hernando, S.E., M.Sc selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan memberikan arahan serta masukan dalam perkuliahan.
7. Ibu Dr.Rita Friyani,S.E.,M.Si selaku pembimbing skripsi utama yang telah banyak membantu dan memberikan banyak saran dan masukan dalam

penyusunan skripsi.

8. Bapak Fredy Olimsar, S.E., M.Si selaku pembimbing skripsi pendamping yang selalu sabar dalam membimbing penulis dan telah memberi banyak ilmu-ilmu yang berguna untuk penulis.
9. Bapak Dr. Mukhzarudfa, S.E., M.Si. Selaku Dosen Penguji 1 yang telah memberi saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
10. Bapak Dr. Yuliusman, S.E., M.Si., Ak., CA., CIQnR Selaku Dosen Penguji 2 yang telah memberi saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
11. Bapak Gandy Wahyu Maulana Zulma, S.Pd., M.S., Ak. Selaku Sekretaris Penguji yang telah memberi saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
12. Seluruh Dosen dan Staf pengajar pada Program Studi Akuntansi Universitas Jambi atas didikan, ilmu dan bimbingan selama perkuliahan.
13. Untuk kedua orang tuaku terkasih yang telah merawat dan memberikan kasih sayang nya dari aku kecil hingga saat ini.
14. Adik-Adik ku Indah Pitri Yani, Titin Kurnia, Fitra Tri yang selalu menjadi alasanku untuk tetap semangat melewati segalanya. Kepada teman-teman seperjuangan dari Grup “Markas” Kurnia A, Rama, Gilang, Deliana, Ressa, Anton, dan Kaila yang selalu mendukung dan memberikan semangat. Seluruh pihak yang turut membantu dan memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga apa yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat dari yang kuasa. Demi Kesempurnaan skripsi ini kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi yang membutuhkan.

Jambi Ferbruari 2023

Penulis

Rizal Habi Yuda

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh Pengaruh Kompetensi, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas desa dalam mengelola keuangan desa di Kecamatan Jambi luar kota. Populasi dalam penelitian ini adalah desa pemerintahan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi yang terdiri dari 19 desa serta terdapat 1 kelurahan. Teknik *Purposive sampling* digunakan dalam pengambilan sampel. Setiap desa diambil oleh 3 responden yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Keuangan. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 57 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan program software SPSS versi 24. Hasil uji t statistik membuktikan Kompetensi, Sistem Informasi Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan pada desa Se-Kecamatan Jambi Luar kota. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pemerintah mengelola dana desa.

Kata kunci: Kompetensi, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Akuntabilitas.

ABSTRACT

The purpose of this study was to see the effect of competence, accounting information systems, internal control systems and information technology utilization on village government accountability in managing village finances in Jambi sub-district outside the city. The population in this study is the administrative village in Jambi Outside the City District, Muaro Jambi Regency which consists of 19 villages and there is 1 sub-district. Purposive sampling technique was used in sampling. Each village was taken by 3 respondents related to village financial management, namely the Village Head, Village Secretary, and Head of Finance. The number of respondents in this study were 57 respondents. The data analysis method used is multiple linear regression using the SPSS software program version 24. The statistical t-test results prove that competency, accounting information systems, and information technology utilization have a positive and significant impact on village government accountability in managing finances in villages throughout the Jambi District. Out of town. Meanwhile, the Internal Control System has no significant effect on government accountability in managing village funds.

Keywords: *Competence, Accounting Information System, Internal Control System and Utilization of Information Technology on Accountability.*

DAFTAR ISI

	Halaman
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Pustaka	11
2.1.1 Teori Stewardship (<i>Stewardship theory</i>)	11
2.1.2 Kompetensi Aparatur.....	12
2.1.3 Sistem Informasi Akuntansi Sektor Publik.....	13
2.1.4 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	16
2.1.5 Teori Pemanfaatan Teknologi.....	21
2.1.6 Akuntabilitas.....	22
2.1.7 Pemerintah Desa	24
2.1.8 Pengelolaan Dana Desa	24
2.2 Penelitian Terdahulu.....	31
2.3 Kerangka Pemikiran	34
2.4 Hipotesis	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Pendekatan Penelitian.....	36
3.2 Objek dan Subjek Penelitian	36
3.2.1 Objek Penelitian.....	36
3.2.2 Subjek penelitian	36
3.3 Tempat Penelitian.....	36
3.4 Jenis dan Sumber Data	37
3.5 Populasi dan Sampel Penelitian	37
3.5.1 Populasi	37
3.5.2 Sampel.....	37

3.6 Definisi Konseptual Dan Operasional Variabel	38
3.6.1 Definisi Konseptual Variabel	38
3.6.2 Definisi Operasional	41
3.7 Teknik Skala Pengukuran.....	43
3.8 Metode Pengumpulan Data	44
3.9 Teknik Analisis dan Uji Hipotesis.....	44
3.10 Uji Kualitas Data	44
3.10.1 Pengujian Validasi	44
3.10.2 Pengujian Reliabilitas	45
3.10.3 Koefisien Determinasi	45
3.11 Pengujian Asumsi Klasik	45
3.11.1 Uji Asumsi Normalitas	46
3.11.2 Uji Asumsi Multikolinieritas	46
3.11.3 Uji Asumsi Heteroskedastisitas	46
3.12 Analisis Regresi Linier Berganda.....	47
3.13 Teknik Pengujian Hipotesis.....	48
3.13.1 Uji Parsial (Uji t)	48
BAB IV GAMBARAN DAN HASIL PENELITIAN	49
4.1 Gambaran Umum Kecamatan Jambi Luar Kota	49
4.1.1 Keadaan Geografis.....	49
4.1.2 Wilayah Pemerintahan Kecamatan Jambi Luar Kota	49
4.1.3 Luas Wilayah dan Jarak Tempuh dari Pusat Pemerintah Desa/Kelurahan dengan Ibu Kota Jambi Luar Kota.....	50
4.1.4 Penduduk Kecamatan Jambi Luar Kota	51
4.1.5 Fasilitas Umum dan Infrastruktur	51
4.1.6 Bidang Pertanian.....	51
4.1.7 Komunikasi,Transportasi dan Sarana Ekonomi	51
4.2 Gambaran Umum penelitian	52
4.2.1 Pengembalian Kuesioner	52
4.3 Deskripsi Responden	52
4.3.1 karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin:	53
4.3.2 Karakteristik Responden berdasarkan Usia	53
4.3.3 Karakteristik responden berdasarkan pendidikan	54
4.4 Uji Instrumen Penelitian.....	54
4.4.1 Uji Validitas.....	54
4.4.2 Uji Reliabilitas	57
4.4.3 Koefisien Determinasi (R ²).....	58
4.5 Analisis Statistik.....	59
4.5.1 Analisis Regresi Berganda.....	59
4.6 Uji Asumsi Klasik	60

4.6.1 Uji Normalitas	60
4.6.2 Uji Multikolinearitas.....	62
4.6.3 Uji Heteroskedastisitas	63
4.7 Uji Hipotesis	64
4.7.1 Uji Parsial (Uji t)	64
4.8 Pembahasan Penelitian	65
4.8.1 Pengaruh kompetensi Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa	65
4.8.2 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa	66
4.8.3 Pengaruh SPIP Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa	67
4.8.4 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa.....	69
BAB V KESIMPULAN	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4. 1 Peta Kecamatan Jambi Luar Kota	49
Gambar 4. 2 <i>Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual</i>	61
Gambar 4. 3 Grafik Uji Heteroskedastisitas	63

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Perkembangan Dana Desa 2015-2020	4
Tabel 3. 1 Operasional Dimensi Variabel	41
Tabel 3. 2 Instrumen Skala Likert	43
Tabel 4. 1 Luas Wilayah dan Jarak Tempuh Pusat Pemerintahan.....	50
Tabel 4. 2 Tingkat Pengembalian Kuesioner	52
Tabel 4. 3 karakteristik responden berdasarkan jenjang jenis kelamin.....	53
Tabel 4. 4 karakteristik responden berdasarkan usia	53
Tabel 4. 5 karakteristik responden berdasarkan jenjang pendidikan	54
Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas (Y).....	55
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Kompetensi (X1).....	55
Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Sistem Informasi Akuntansi (X2)	56
Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern (X3)	56
Tabel 4. 10 Hasil Uji Validitas Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4)	57
Tabel 4. 11 Uji Reliabilitas	58
Tabel 4. 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	58
Tabel 4. 13 Uji Regresi Berganda	59
Tabel 4. 14 Uji Normalitas.....	61
Tabel 4. 15 Uji Multikolinearitas	62
Tabel 4. 16 Uji Parsial (Uji t).....	64

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2. Tabulasi Data Karakteristik Responden
- Lampiran 3. Tabulasi Data Variabel Penelitian
- Lampiran 4. Tabel r
- Lampiran 5. Output Hasil Analisis SPSS 24
- Lampiran 6. Surat Permohonan Izin Penelitian Dan Pengambilan Data Yang Dikeluarkan Oleh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
- Lampiran 7. Surat Mahasiswa Telah Melaksanakan Penelitian dan Pengambilan Data yang dikeluarkan Oleh Kantor Kecamatan Jambi Luar Kota
- Lampiran 8. Surat Mahasiswa yang dikeluarkan saat selesai melakukan penelitian yang dikeluarkan oleh Kecamatan Jambi Luar Kota
- Lampiran 9. Foto dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memprioritaskan Desa dalam pembangunan, menyediakan dana Desa yang diambil langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dikelola oleh Desa secara mandiri. Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan banyak sekali pembangunan infrastruktur seperti yang sedang dilaksanakan pemerintah Indonesia yaitu membangun desa untuk menjadikannya semakin maju dan berkembang dengan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Pembangunan desa juga membutuhkan dana yang tidak sedikit, dimana dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui APBD wajib untuk dikelola dengan baik (Raharjo, 2021).

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut.

Indrawati (2017), menyatakan bahwa Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain itu, dalam rangka menciptakan tata kelola keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan bertanggungjawab, maka diterbitkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan pertimbangan untuk

melaksanakan ketentuan Pasal 106 PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 29 bahwa “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Selanjutnya dalam angka 6, dijelaskan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan.

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:

- a. laporan keuangan, terdiri atas:
 1. laporan realisasi APBDes
 2. Catatan atas laporan keuangan.
- b. laporan realisasi kegiatan dan
- c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Selanjutnya Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Desa.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menyatakan bahwa sumber pendanaan terbesar desa berasal dari APBN dan APBD. Dalam rangka

mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), tentunya dalam hal ini pemerintah harus melakukan suatu upaya meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan pusat sampai kepada bagian pemerintahan terendah seperti desa. Pengelolaan. Untuk mendukung dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa, tentunya pemerintah harus memanfaatkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam pelaporan keuangan, dalam hal ini suatu sistem yang berbasis komputer telah direncanakan pemerintah yakni aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang resmi mulai ditetapkan pada tahun 2015 untuk mendukung pelaksanaan ini guna memudahkan dalam mengumpulkan, memproses, mencatat, serta pengelolaan transaksi-transaksi data yang telah dilakukan sehingga dapat menghasilkan informasi yang akan disajikan baik itu untuk pihak internal maupun eksternal (Ismail dkk, 2016).

Nugrahaningsih & Suranta (2018), SISKEUDES bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Desa (SIA BUMDes) pada akhir Tahun 2016. SIA dalam BUMDes dikembangkan untuk membantu pengelola operasional BUMDesa dalam pengelolaan transaksi akuntansi, penyusunan laporan keuangan, dan laporan kinerja BUMDes. Pada tahap awal pengembangan, SIA BUMDes telah diimplementasikan pada 15 BUM Desa di Provinsi Bali. proses penginputan sesuai dengan transaksi yang ada, SISKEUDES dan SIA BUMDes dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain dari sisi kemudahan, keduanya juga dilengkapi dengan Sistem Pengendalian Intern (*Built-in Internal Control*) dan didukung dengan Petunjuk Pelaksanaan Implementasi dan Manual Aplikasi. BPKP mendorong APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) untuk ikut serta dalam Satuan Tugas Pemerintah Daerah dalam implementasi SISKEUDES.

Dalam pelaksanaannya, dana desa mulai dilokasikan dalam APBN sejak 2015-2022. Terhitung sejak UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diresmikan, dana desa telah mampu meningkatkan status desa yang berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat. UU Nomor 6 Tahun 2014 menjadikan desa sebagai

beranda depan pembangunan Indonesia. Dana Desa yang disalurkan dari APBN menjadi wujud nyata rekognisi desa. Desa-Desa secara mandiri dapat menyusun dan menjalankan rencana pembangunan secara mandiri berdasarkan azas musyawarah (Timotius 2018). Berikut adalah perkembangan alokasi dana desa

Tabel 1. 1
Perkembangan Dana Desa 2015-2020

Tahun 2015- 2022	Realisasi Dana Desa (APBN) (Triliun)	Pertumbuhan (%)
2015	20.766	0
2016	46.679	0,4
2017	59.766	0,6
2018	59.859	0,8
2019	69.814	1
2020	71.100	1,2
2021	71.856	1,4
2022	68.000	-1,1

Sumber: Nota Keuangan dan LKPP

Berdasarkan tabel 1.1 Badan Pusat Statistik Pemerintah Pusat Perkembangan dana desa selama tahun 2015-2022, secara akumulatif dana dari APBN telah disalurkan sebagai dana desa sebesar Rp 488,6 triliun. Tahun 2015, dana desa disalurkan sebesar Rp 20,7 triliun, 2016 naik menjadi Rp 46,9 triliun, 2017 dan 2018 naik masing-masing Rp 60 triliun, tahun 2019 kembali ada kenaikan menjadi Rp 70 triliun. Pada tahun 2020 dana desa disalurkan sebesar Rp 71 triliun, dan pada tahun 2021 naik menjadi Rp 72 triliun. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3,1% dari tahun 2021 menjadi 68 triliun.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi (2021). Realisasi penyerapan dana desa di Provinsi Jambi per 21 Juli 2021 mencapai 47,02 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 1,22 triliun atau Rp 574,65 miliar. "Hingga 21 Juli 2021, realisasi dana desa Provinsi Jambi mencapai 47,02 persen atau sebesar Rp 574,65 miliar. Realisasi dana desa tersebut dari 1.399 desa yang tersebar di sembilan kabupaten dan kota. Untuk realisasi dana desa tertinggi yakni di Kabupaten Muaro Jambi, yang sudah mencapai 78,12 persen atau Rp 99,92 miliar dari pagu anggaran Rp 127,90 miliar.

Menurut Banoet & Rantelobo (2022), dana desa yang dialokasikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga desa yang terdampak pandemi Covid-19 sebesar 8 persen dari pagu anggaran dana desa dari masing-masing desa. Penerima BLT dana desa mendapatkan bantuan senilai Rp300 ribu per kepala keluarga yang disalurkan dalam waktu satu bulan sekali. Warga desa yang menerima bantuan BLT dana desa tersebut merupakan warga desa yang terdampak pandemi Covid-19 dan tidak mendapatkan bantuan sosial lainnya dari pemerintah, seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan sosial tunai (BST). Beberapa permasalahan terkait dengan BLT-DD sebagai berikut:

- a. Terdapat beberapa desa yang terlambat menetapkan APBDes.
- b. Lambatnya proses perekaman data KPM di desa setiap bulan.
- c. Penyaluran BLT-DD secara bulanan sulit untuk dilakukan mengingat kondisi geografis beberapa desa yang sulit dijangkau dan
- d. Pembayaran BLT-DD tidak dapat dibayarkan secara akumulasi (harus dibayarkan setiap bulan) sehingga terdapat konsekuensi periodik yang dihadapi setiap desa.

Akuntabilitas dalam pemerintahan desa menurut Indrawati (2017) dalam Sumpeno (2011) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dengan Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen didalamnya.

Akuntabilitas sektor publik adalah kewajiban agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada prinsipal yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawabannya (Renyowijoyo, 2018).

Kompetensi yang dimiliki aparatur desa juga menjadi tolak ukur dalam pengelolaan dana desa yang baik dan akuntabel sebab aparatur desa yang berkompeten dan memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa akan mudah menjalankan tugasnya. Aparatur desa yang berkompeten dapat mengurangi

penyimpangan yang mungkin muncul dalam pengelolaan dana desa (Umaira dan Adnan, 2019).

Dalam mendukung dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa, tentunya pemerintah harus memanfaatkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam pelaporan keuangan, dalam hal ini suatu sistem yang berbasis komputer telah direncanakan pemerintah yakni aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang resmi mulai ditetapkan pada tahun 2015 untuk mendukung pelaksanaan ini guna memudahkan dalam mengumpulkan, memproses, mencatat, serta pengelolaan transaksi-transaksi data yang telah dilakukan sehingga dapat menghasilkan informasi yang akan disajikan baik itu untuk pihak internal maupun eksternal. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah desa harus mampu melayani masyarakatnya dan mengelola dana desa dengan baik. Hal penting lainnya, aparat desa harus mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah dan melancarkan pekerjaannya. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dapat meningkatkan kinerja di berbagai kegiatan dengan cepat, tepat dan akurat sehingga dapat meningkatkan produktivitas (Azhar, 2013).

Akuntabilitas pemerintah desa terdapat berbagai masalah salah satunya sesuai dengan pernyataan banyak laporan dari masyarakat desa yang menyangkut dalam pengelolaan dana desa. Fenomena atau permasalahan yang berkaitan dengan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa yaitu:

- 1) Dalam Pengelolaan atau Pemanfaatan Dana Desa belum sesuai dengan prioritas. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa untuk COVID-19 kurang optimal, hanya melakukan dokumentasi foto untuk pertanggungjawaban administratif namun kegiatan tidak dilaksanakan.
- 2) Pengelolaan dana desa di Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi masih banyak yang menyimpang. Penyimpangan atau penyalahgunaan dana desa di kabupaten itu diduga akibat ketidaktahuan para kepala desa mengenai tata kelola dana desa. Salah kelola dana desa itu menyebabkan banyak dana desa yang menguap alias tidak jelas penggunaannya. (Saragih, 2019)
- 3) Adanya permasalahan hukum yang menimpa kepala desa akibat

penyalahgunaan Dana Desa, penyimpangan dana desa di Muarojambi yang terkait dengan pembangunan fisik antara lain adanya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur desa yang tidak sesuai dengan rencana. Namun anggaran dana desa untuk pembangunan fisik tersebut dilaporkan tetap habis.(Heriansyah, 2018).

- 4) Masih rendahnya realisasi serapan dana desa di Provinsi Jambi tersebut karena banyak desa yang terlambat memenuhi syarat pencairan dana desa seperti harus melampirkan laporan penggunaan dana desa sebelumnya. Penyaluran dana desa tersebut dilakukan per triwulan atau empat tahap dalam setahun. Untuk dapat mencairkan dana desa tahap kedua, pemerintah desa harus menyampaikan laporan penggunaan dana desa tahap pertama. (Supendi, 2021).

Survei yang dilakukan BPKP pada akhir Tahun 2014 menunjukkan bahwa kondisi desa bervariasi mulai dari pemerintah desa yang minim sarana prasarana karena kendala supply listrik, hingga pemerintah desa yang sudah maju karena telah berbasis teknologi (web/internet). Kualitas SDM rata-rata belum memadai (belum memahami pengelolaan keuangan), karena tingkat pendidikannya yang bervariasi. Di samping itu, masih terdapat desa yang belum menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa, serta belum menyusun laporan sesuai ketentuan. Evaluasi APBDesa juga belum didukung kesiapan aparat kecamatan serta pengawasan belum didukung SDM memadai di tingkat APIP Kabupaten/Kota.

Penggunaan Alokasi Dana Desa masih terjadi penyalahgunaan terjadinya kecurangan berupa penyelewengan dana oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Disinilah peran penting masyarakat sebagai pengawas langsung jalannya pemerintahan desa agar pembangunan desa dapat berjalan secara semestinya kearah yang lebih maju dapat dijalankan, masyarakat desa diharapkan bisa dengan seksama mengawasi jalannya pemerintahan desa agar kecurangan dapat diminimalisir. Hal ini dilakukan karena

sebesar 70% dari Alokasi Dana Desa diperuntukan untuk kepentingan dan pemberdayaan masyarakat desa dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan ke sektor perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemukiman, honor tim pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting untuk kemajuan desa. Sedangkan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk penyelenggaraan pemerintah desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (Arista, 2017).

Di sisi lain berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2014 pemerintah Desa akan diberikan dana untuk dikelola guna membiayai penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Bila mengacu pada PP Nomor 60 tahun 2014 sudah cukup jelas bahwa alokasi dana yang diberikan ke masing-masing Desa sangat besar yakni dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis. Dana ini cukup besar untuk digunakan oleh pemerintah Desa guna memperbaiki kesejahteraan warga di Desa masing-masing.

Penelitian sebelumnya telah banyak meneliti mengenai faktor-faktor yang bisa memengaruhi akuntabilitas, kompetensi, sistem informasi akuntansi sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi terhadap akuntabilitas pemerintah desa. Seperti penelitian yang dilakukan (Indraswari & Rahayu, 2021), (Puspa & Prasetyo, 2020) oleh (Wardani & Andriyani, 2017), (Aziiz, 2019), (Arfiansyah, 2020), (Martini, 2019), (Wahyuni dkk., 2018), (Yulianti dkk, 2018), (Argreshy, 2021) yang membuktikan hasil yang beragam.

Untuk mengatasi fenomena di atas maka pemerintah desa secara umum harus melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik dan berwawasan publik. Pemerintah desa selain melakukan fungsi strukturnya, juga diharapkan mampu menjalankan fungsi sosialnya. Karena pemerintah desa merupakan lembaga yang posisinya paling dekat di masyarakat. Oleh karena itu, tujuan Penelitian ini adalah

untuk memberikan bukti empiris atas pengaruh kompetensi, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa pada desa se-kecamatan Jambi Luar Kota.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Maka perumusan masalah yang dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jambi Luar Kota ?
2. Apakah Sistem Informasi Akuntansi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jambi Luar Kota ?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal Berpegaruh Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jambi Luar Kota ?
4. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpegaruh Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jambi Luar Kota?

1.3 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa
4. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Aspek Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan lebih banyak wawasan tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa.
- b. Diharapkan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan.

2) Aspek Teoritis

Bagi penulis Penelitian ini dapat menambah wawasan dari teori yang diterima sehingga diperoleh kriteria daerah berdasarkan rasio kemandirian, rasio kemampuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Stewardship (*Stewardship theory*)

Stewardship theory adalah teori yang didasarkan pada asumsi filosofis tentang sifat manusia. Manusia hakikatnya dapat dipercaya, penuh tanggung jawab bila bertindak, berintegritas dan jujur. Pandangan *stewardship* bermakna bahwa manusia sebagai makhluk hidup membutuhkan untuk hidup berkelompok dan bekerja sama Puspa (2020).

Stewardship theory merupakan bagian dari teori *agency*. Menurut Donaldson & Davis (1989) teori *stewardship* menggambarkan suatu keadaan dimana seorang manajer lebih mengutamakan kepentingan organisasi untuk tujuan utamanya bukan termotivasi terhadap kepentingan individu. Teori *stewardship* didasari atas teori psikologis serta sosiologi para pemikir akuntansi manajemen. Teori *stewardship* memberikan sebuah asumsi filosofi dari sifat manusia yaitu dapat dipercaya, bertanggung jawab, jujur serta memiliki integritas atas setiap aktivitas yang dilakukannya. Berdasarkan teori *stewardship* menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Keberhasilan organisasi dapat dicapai dengan cara memaksimalkan utilitas *steward* dan *principal*.

Model penatalayanan adalah salah satu yang didasarkan pada manajer sebagai "pelayan" daripada orang ekonomi rasional yang sepenuhnya tertarik pada teori agensi (Muth dan Donaldson, 1998). Teori *stewardship* dapat berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban untuk dapat memastikan pemantauan, audit dan pelaporan yang baik agar dapat membantu pencapaian tujuan organisasi (Harryanto 2014). Menurut Teori *stewardship* kepentingan bersama adalah dasar seorang *Stewards* melakukan tindakan. Sehingga apabila terdapat perbedaan kepentingan antara *principals* dan *stewards*, maka *steward* akan berusaha bekerjasama untuk bertindak sesuai dengan tindakan *principals* dan demi kepentingan bersama agar tercapainya tujuan bersama. Hal penting dalam

Stewardship theory adalah *stewards* menyelaraskan tujuan sesuai tujuan *principals* namun bukan berarti *steward* tidak memiliki kebutuhan (Haliah 2015).

Penerapan Teori *stewardship* digunakan karena kepercayaan dari *principals* yang diberikan kepada Pemerintah Desa (*Stewards*) dapat terjadi jika bertindak sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang muncul, yaitu kepentingan publik pada umumnya. Penggunaan teori *Stewardship* pada organisasi Pemerintahan Desa adalah untuk mendeskripsikan eksistensi pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik yang dapat dipercaya, menampung aspirasi masyarakatnya, memberikan pelayanan yang baik, dan dapat mempertanggung jawabkan apa yang diamanahkan kepadanya. Sehingga tujuan organisasi untuk mensejahterakan masyarakatnya dapat dicapai secara maksimal. Implikasi teori *Stewardship* terhadap penelitian ini adalah menjelaskan keberadaan pemerintah desa (*steward*) dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya akan mengerahkan semua kemampuan dan keahliannya. Akan melaksanakan Tupoksinya dengan menjunjung tinggi integritas dan kejujuran sehingga kesejahteraan masyarakat (*principal*) dapat dicapai secara maksimal (Lamo 2015).

2.1.2 Kompetensi Aparatur

Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, efektif dan efisien serta bertanggung jawab kepada organisasi (Yulianti dkk., 2018). Kompetensi aparatur adalah kemampuan yang harus dimiliki aparatur berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya Adha Inapty & Martiningsih (2016).

Kompetensi menggambarkan apa yang dilakukan di tempat kerja. Apa yang dikerjakan tersebut dijelaskan pada berbagai tingkatan dan diperinci standar tersebut untuk masing-masing tingkatan. Dengan mengidentifikasi karakteristik pengetahuan dan keterampilan individu yang diperlukan ditempat kerja memungkinkan tugas dan tanggung jawab akan dilakukan secara efektif. Dengan demikian standar kualitas profesional akan dapat dicapai Puspa & Prasetyo (2020).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017 tentang kompetensi pemerintahan. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negera, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Aparatur Sipil Negera tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Terkait pengelolaan dana desa, seorang aparatur desa harus memiliki kemampuan yang baik agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa tersebut karena aparatur desa yang berkompeten dalam mengelola keuangan desa dapat meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa tersebut, dan begitu pula sebaliknya (Umaira dan Adnan 2019).

2.1.3 Sistem Informasi Akuntansi Sektor Publik

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dan anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Sujarweni & Utami (2015). Sedangkan menurut Halim dan Kusufi (2012) menjelaskan yang dimaksud akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan. Selanjutnya, adapun tujuan pokok akuntansi pemerintahan adalah:

- 1) Pertanggungjawaban, yaitu memberikan informasi keuangan yang lengkap pada waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang

bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Fungsi pertanggungjawaban mengandung arti yang lebih luas daripada sekedar ketaatan terhadap peraturan, tetapi juga keharusan bertindak bijaksana dalam penggunaan sumber-sumber daya.

- 2) Manajerial, yaitu akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah. Tujuan ini perlu dikembangkan agar organisasi pemerintah tingkat atas dan menengah dapat menjadikan informasi keuangan atas pelaksanaan yang lalu untuk membuat keputusan ataupun penyusunan perencanaan untuk masa yang akan datang.
- 3) Pengawasan, yaitu akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Sedangkan Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan-kumpulan dari sub-sub sistem atau komponen fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengelola data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan (Azhar, 2013).

Menurut Bodnar & Hopwood dalam Hendara Ronaldi (2012) Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi, informasi ini dikomunikasikan kepada bagian beragam pengambil keputusan. Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, menghasilkan dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk mengambil keputusan kepada pihak-pihak luar (seperti inspeksi pajak, investor dan kreditor) dan pihak manajemen (Baridwan, 2015).

Menurut Romney & Steinbart (2016) sistem informasi akuntansi adalah:

"... a system that collects, records, stores, and processes data to produce information for decision makers. AIS components include: people, procedures and

instructions, data, software, information technology infrastructure, and internal controls and security measures.” Terdapat enam komponen sistem informasi akuntansi menurut Romney & Steinbart (2016) yaitu :

1. Para pengguna yang menggunakan sistem.
2. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data.
3. Data yang berisikan tentang organisasi serta kegiatan bisnisnya.
4. Perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data.
5. Infrastruktur teknologi informasi, yang di dalamnya termasuk komputer, perangkat perifer, dan perangkat komunikasi jaringan yang digunakan dalam mengolah sistem informasi akuntansi.
6. Pengendalian internal dan prosedur keamanan guna melindungi sistem informasi akuntansi.

Menurut Handayani Monika (2019). akuntansi sektor publik adalah suatu sistem yang digunakan oleh lembaga publik sebagai sarana pertanggungjawaban kepada publik. Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal utama, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas.

1) Penyediaan Informasi

Akuntansi sektor publik merupakan sarana penyediaan informasi bagi pemerintah sekaligus sarana informasi bagi masyarakat. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategis, penyusunan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

2) Sistem Kontrol Manajemen

merupakan suatu proses pengendalian manajemen, akuntansi diperlukan dalam pembuatan laporan keuangan sektor publik berupa laporan surplus/devisa pemerintah. Informasi akuntansi sebagai alat pengendalian manajemen berguna untuk pengambilan keputusan, untuk mengalokasikan sumber daya dan juga digunakan untuk menentukan indikasi kinerja sebagai dasar penilaian kinerja.

3) Teknologi Informasi Akuntansi

Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu dalam bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemrosesan informasi. Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe*, mini, mikro), perangkat lunak, database, jaringan (internet, intranet), perdagangan elektronik, dan jenis lain yang terkait dengan teknologi.

Sistem Informasi Akuntansi yang sudah memenuhi kriteria dan sudah sesuai dengan ketentuan, diharapkan dapat mencegah terjadinya kekeliruan yang bisa merugikan negara dalam hal ini dana yang telah diterima desa, serta mencegah terjadinya penyelewengan dana desa dan pelaksanaan pembangunan akan terus meningkat sehingga akan memberikan keuntungan bagi desa dan masyarakat. Sistem Informasi Akuntansi pada pengelolaan dana desa akan memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap ketidakstabilan pengelolaan dana desa yang ada serta Sistem Informasi Akuntansi yang baik akan berpengaruh terhadap sistem pengelolaan dana desa yang ada di desa tersebut. Widjajanto (2001) mengemukakan bahwa Setiap organisasi yang menggunakan komputer untuk memproses data transaksi memiliki fungsi sistem informasi.

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Pengendalian internal merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Penggunaan sistem pengendalian internal untuk mengarahkan operasi perusahaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem. (Widyatama, *et al* 2017).

Pada tahun 1992, COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission*) yang didirikan dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut telah menerbitkan *Internal control framework* yang di dalamnya disusun definisi umum untuk pengendalian internal, standar, dan kriteria pengendalian. Pengendalian internal menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*

menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan instrumen terpenting yang dapat menyediakan *reasonable assurance* (jaminan yang layak) mengenai pencapaian dari tujuan atas kategori tertentu. Melaksanakan pengendalian Internal adalah alasan utama untuk memastikan proses pencapaian tujuan dapat terlaksana dan mengurangi berbagai risiko yang tidak diinginkan (Dwi Fitri Puspa dan Riky Agung Prasetyo 2020) .

Pengendalian internal terdiri atas lima komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, kegiatan informasi dan komunikasi, serta pengawasan Lathtifah Nurul (2021) yang dapat diterapkan pada organisasi privat maupun publik, yang berorientasi pada profit ataupun tidak. Berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2019, sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian, merupakan kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian suatu organisasi dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Penilaian risiko, merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya situasi yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
3. Kegiatan pengendalian, merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penerapan dan pelaksanaan kebijakan secara efektif.
4. Informasi dan komunikasi, merupakan Dalam melaksanakan informasi dan komunikasi, pimpinan unit kerja dan satuan kerja wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Informasi dan komunikasi terdiri atas:
 - a. unsur informasi, merupakan data yang sudah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
 - b. unsur komunikasi, merupakan proses penyampaian pesan atau

informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

5. Pemantauan, merupakan proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Struktur pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas, dan segenap personel) yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian Keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi (Bastian, 2010)

Inspektorat daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang SPIP pada bagian kedua mengenai Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Inspektorat daerah merupakan pengawas internal (internal auditor) dalam pemerintah daerah. Sebagai pengawas internal, keberadaan inspektorat daerah dinilai sangat penting dilihat juga dari fungsi dasarnya yaitu melakukan pengawasan pada seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Menurut PP No. 60 Tahun untuk memberikan keyakinan yang memadai guna tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dengan keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan Pemantauan Pengendalian Intern.

Terdapat unsur-unsur pokok sistem pengendalian intern yang menunjang perbaikan suatu sistem dalam suatu perusahaan, yang menurut Mulyadi,(2015) adalah sebagai berikut:

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

Struktur organisasi merupakan rerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Struktur organisasi suatu perusahaan dibuat untuk membantu kelancaran kegiatan dan aktivitas perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya, karena dalam organisasi ini para karyawan saling bekerja sama dengan keahlian dan kemampuan yang berbeda.

- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.

Di dalam suatu organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang berwenang. Tidak ada satu pun transaksi yang terjadi apabila tidak diotorisasi oleh yang memiliki wewenang terhadap transaksi tersebut. Untuk itu, organisasi harus dirancang sistem yang mengatur pembagian wewenang otorisasi atas terlaksananya suatu transaksi. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan merupakan salah satu unsur pengendalian intern yang bertujuan untuk melindungi kekayaan, hutang, pendapatan, dan biaya yang ada di dalam suatu perusahaan. Dengan otorisasi yang jelas, maka setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan akan dapat dipertanggung jawabkan pelaksanaannya sebab hanya dengan otorisasi dari pejabat yang berwenang maka transaksi itu akan terjadi. Pemberian otorisasi terhadap suatu transaksi yang terkait dengan penggunaan formulir, karena formulir merupakan media yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi dalam organisasi.

- 3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

Unsur praktik yang sehat merupakan unsur sistem pengendalian intern yang sangat erat hubungannya dengan unsur pembagian tanggung jawab dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan. Hal ini disebabkan pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang serta prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik apabila

tidakditerapkan suatu cara yang dapat menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.

4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian intern yang paling penting. Karena bagaimana pun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasidan prosedur pencatatan serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Tujuan sistem pengendalian intern menurut Mulyadi (2015) yang meliputi tujuan pokok sistem pengendalian intern adalah :

- a. Menjaga kekayaan organisasi.
- b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
- c. Mendorong efisiensi.
- d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Tujuan pengendalian intern menurut Mulyadi (2015) adalah sebagai berikut:

1. Menjaga keamanan harta milik pemerintah desa.
2. Memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi.
3. Meningkatkan efisiensi dalam operasi.
4. Membantu menjaga agar tidak timbul penyimpangan dari kebijakan manajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Dari berbagai penjelasan mengenai tujuan sistem pengendalian intern yangdinyatakan oleh para ahli di atas maka dapat disimpulkan kembali mengenai makna dari tujuan-tujuan di atas yaitu:

1. Menjaga keamanan harta-harta milik pemerintah desa.

Apabila harta-harta milik perusahaan tidak dilindungi dengan pengendalian intern yang memadai kekayaan fisik dapat dicuri, disalah gunakan atau rusak tanpa disengaja. Demikian pula halnya dengan kekayaan fisik seperti aktivitas usaha, dokumen-dokumen penting dan keandalan data akuntansi juga harus dilindungi secara baik dan benar.

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

Agar dapat menyelenggarakan dengan baik, madan mengelola dana desa dengan baik, jajaran staf desa harus mempunyai informasi yang akurat.

Berbagai informasi yang penting dibutuhkan untuk mengambil keputusan.

3. Mendorong efisiensi.

Pengendalian intern dalam suatu pemerintahan desa dimaksudkan untuk menghindari pengulangan kesalahan yang tidak perlu dan pemborosan dalam seluruh aspek pengelolaan dana desa, serta mencegah penggunaan sumber daya secara tidak terkendali.

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Manajemen yang dimaksudkan adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat berbagai materi dan prosedur untuk mencapai tujuan pemerintahan. Sistem pengendalian intern yang dimaksud untuk memastikan bahwa segala peraturan dan prosedur ini bisa dilakukan dan ditaati oleh pelaksana pemerintahan desa.

2.1.5 Teori Pemanfaatan Teknologi

Warsita (2011) menyatakan bahwa teknologi informasi adalah sarana dan prasarana yang meliputi *hardware*, *software* dan *useware* untuk memperoleh, mengelola, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, mengirimkan dan menggunakan data sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Sedangkan, menurut Uno dan Lamatenggo (2010) menyatakan bahwa teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan dengan tujuan untuk mengelola suatu data. Pengolahan dalam hal ini adalah memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.

Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu dalam bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemrosesan informasi (Abdul Karir, 2013). Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dengan jalan membangun jaringan sistem informasi dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Saat ini, pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi

suatu kebutuhan pokok yang dapat diandalkan dalam melaksanakan tugas harian aparat pemerintah secara optimal, akurat dan tepat waktu. Salah satunya adalah membuat laporan keuangan yang diisi dengan informasi-informasi keuangan yang akurat yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Selanjutnya Teknologi Informasi (TI) dilihat dari penyusunannya adalah teknologi dan informasi. Kata Teknologi bermakna pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, kata teknologi berdekatan artinya dengan istilah tata cara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi”.

Menurut Romney dan Steinbart (2015) menyatakan bahwa: Perancangan sistem informasi menggunakan teknologi informasi (*TI – information technology*) untuk membantu mengambil keputusan menyaring dan meringkas informasi secara efektif. Teknologi informasi ini merupakan komputer dan perangkat elektronik yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, mentransmisikan, dan memanipulasi data.

2.1.6 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Menurut Yulianti dkk., (2018) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah Pengelolaan keuangan desa (APBDesa) yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Secara umum akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode

sebelumnya yang dilakukan secara periodik Mustofa (2012). Akuntabilitas memiliki 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Akuntabilitas keuangan yaitu pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan, penyimpanan, serta pengeluaran.
2. Akuntabilitas manfaat yaitu pertanggung-jawaban yang mencakup terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas
3. Akuntabilitas prosedural yaitu pertanggungjawaban terkait pada pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas serta kepastian hukum.

Akuntabilitas sektor publik adalah kewajiban agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada prinsipal yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawabannya Renyowijoyo (2013).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai bentuk pertanggung-jawaban pengelolaan dana desa yang telah dipercayakan sebagai pelaksanaan kewajiban kepala desa dalam rangka pencapaian tujuan desa. Akuntabilitas diharapkan mampu memperbaiki kualitas kinerja pemerintahan desa sehingga pengelolaan dana desa menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat. Kepercayaan inilah yang akan mengurangi tingkat penyimpangan dana desa sehingga masyarakat desa dapat diberdayakan menjadi masyarakat mandiri dan pada akhirnya menjadi desa mandiri. Menurut Yulianti dkk., (2018) ada empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu;

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*Accountability for Probity and Legality*).

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses.

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas program.

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan.

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.1.7 Pemerintah Desa

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18). Permendagri 113 menyatakan bahwa dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan kaur keuangan desa).

2.1.8 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa menurut adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 29 bahwa “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan

hak dan kewajiban Desa”. Selanjutnya dalam angka 6, dijelaskan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan ketentuan mengenai dana desa yang bersumber dari APBN diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, tetapi implementasi peraturan pemerintah tersebut merupakan satu kesatuan dengan peraturan pemerintah ini. Beberapa indikator yang dapat dilakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa (DD) yaitu:

1. Pengelolaan
 - a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adanya Dana Desa (DD).
 - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan.
 - c. Meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (DD)
2. Penggunaan
 - a. Kegiatan yang didanai sesuai dengan telah direncanakan dalam APBDesa
 - b. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai sesuai yang ditargetkan
 - c. Menyerap tenaga kerja
 - d. Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin)
 - e. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan Dana Desa (DD)
 - f. Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa

g. Mampu bersinergi dengan program-program Pemerintah yang ada di desa/kelurahan tersebut.. Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat”.(Sunardi & Lesmana, 2020).

Tahap-tahap pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 meliputi :

1. Tahap Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan Sujarweni (2015). Mekanisme perencanaan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- 3) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lama bulan oktober tahun berjalan.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan
- 5) Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau Sebutan

Lain.

- 6) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 7) Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 8) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 9) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- 10) Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 11) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan

pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Sujarweni, 2015). Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

- 1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- 4) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBD desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBD desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- 5) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
- 6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- 7) Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- 8) Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- 9) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
- 10) Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP),

Pernyataan tanggungjawab belanja; dan lampiran bukti transaksi.

- 11) Berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Kepala Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- 12) Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
- 13) Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes (Sujarweni 2015).

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut (Permendagri, Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan Keuangan Desa) laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

1) Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktifitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi

perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

2) Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3) Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

4. Tahap Pelaporan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

1) Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

- a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- c. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- d. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
- e. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pertanggungjawaban terdiri dari:

1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan.
 - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yenty Astari Dewi, Nasfi dan Mai Yuliza (2021)	Sistem Pengendalian Intern,Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi,Pertanggung Jawaban Pengelolaan Dana Desa	Hasil Penelitian adalah Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Penggunaan Informasi Akuntansi Teknologi, kompetensi aparatur Nagari berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sehingga dengan aparat yang kompeten dalam mengelola Dana Desa, akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dapat tercapai.

2	Nafadhila Eka Indraswari dan Yuliasuti Rahayu (2021)	Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kompetensi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan untuk pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3.	Dwi Fitri Puspa dan Riky Agung Prasetyo (2020)	Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Aksesibilitas laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4.	Siti Sarah, Taufeni Taufik, dan Devi Safitri (2020)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat Dan SPI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu	Hasil penelitian menunjukan bahwa Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat Dan SPI berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu
5.	Widia Yulianti, Kamaliah, Rasuli (2019)	Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, <i>Internal Control</i> terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Keuangan	Hasil penelitian menunjukan bahwa Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, <i>Internal Control</i> terhadap berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan

		Desa (Studi Empiris di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2018)	keuangan desa pada pemerintah desa.
6.	Andi Riska Andreani Syafaruddin, Hj. Jeni Kamase, dan Mursalim (2019)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, sistem Pengendalian Intren, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa di Kabupaten Takalar	Hasil penelitian adalah kompetensi aparatur berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas. Sedangkan Sistem pengendalian internal Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.
7.	Siska Wahyuni, Novita Indrawati, Al Azhar L (2018)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi, dan Kompetensi Aparat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Empiris Desa-Desa Di Kabupaten Rokan Hulu	Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern, sistem informasi akuntansi dan kompetensi aparat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
8.	Dewi Kusuma Wardani, Ika Andriyani (2017)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten	Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa. Sementara itu, pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan

			Keuangan Pemerintahan Desa.
9.	Mufti Arief Arfiansyah (2017)	Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

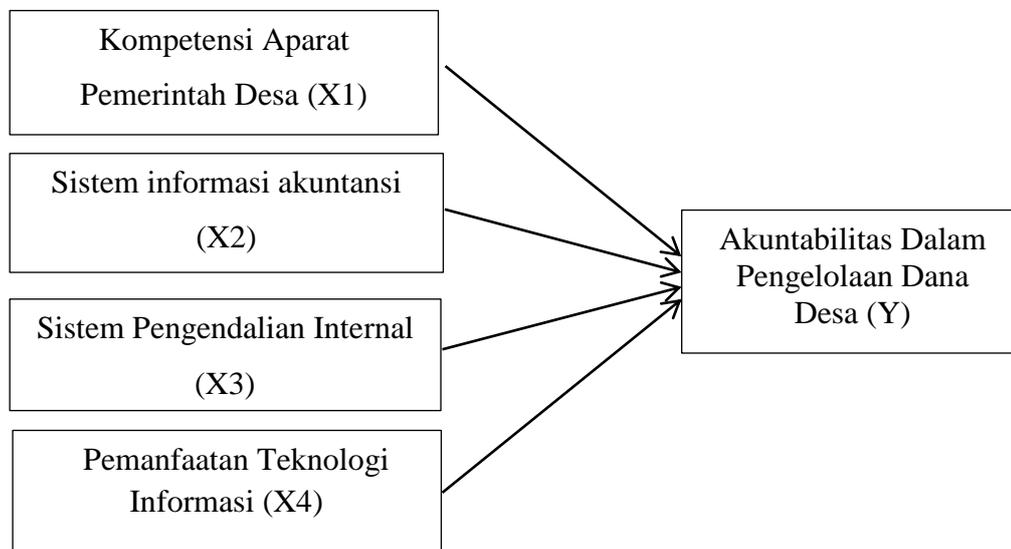
Sumber : Penelitian terdahulu

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kompetensi, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa.

Penelitian ini juga menggunakan *accountability framework (accountability infrastructure, accountability practice dan accountability culture)* untuk mengetahui Sejauh mana level penerapan sitem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal tersebut dan Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi mengenai pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa .

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting didalam penelitian. Kerangka berpikir yang sempurna akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang akan dijadikan sebagi objek penelitian (Sekaran & Bougie 2019).



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Sekaran & Bougie (2019) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, tetapi dapat diuji dan dapat memperkirakan apa yang ingin ditemukan didalam data empiris. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Hipotesis lebih mengacu kepada pendapat atau asumsi yang mungkin benar dan mungkin salah. Hipotesis penelitian yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

- H1 : Kompetensi Aparat Pemerintah desa berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa
- H2 : Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa
- H3 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa
- H4 : Peran Teknologi Informasi berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif. Sekaran & Bougie (2019) Penelitian kuantitatif adalah metode ilmiah yang datanya berbentuk angka atau bilangan yang dapat diolah dan di analisis dengan menggunakan perhitungan matematika atau statistika. Berdasarkan pemaparan pengertian Metode penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif.

3.2 Objek dan Subjek Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Kriteria Objektif yaitu dalam metode ilmiah menghendaki bahwa segala fenomena yang diperoleh kemudian dianalisis harus berlangsung secara objektif. Objek yang akan diteliti yaitu mengenai Kompetensi, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa.

3.2.2 Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah perangkat desa yakni kepala desa, sekretaris desa dan Kaur keuangan desa.

3.3 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di seluruh desa pada kecamatan Jambi Luar Kota. Tempat penelitian digunakan untuk mendapatkan data, informasi, keterangan dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penelitian sekaligus sebagai tempat dilaksanakan penelitian.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sekaran & Bougie (2019) menyatakan bahwa data primer (*Primary data*) merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti atau pihak pertama terkait dengan variabel dari studi untuk tujuan tertentu, sedangkan data sekunder (*secondary data*) merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada.

Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil koesioner yang dibagikan kepada Responden penelitian pada seluruh desa pada Kecamatan Jambi luar kota. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kantor camat seperti total alokasi anggaran pertahun yang di alokasikan kedesa.

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian

3.5.1 Populasi

Sekaran & Bougie (2019) menyatakan bahwa populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau hal-hal yang menarik dimana peneliti ingin membuat opini (berdasarkan statistik sampel). Populasi pada penelitian ini adalah Desa pada Kecamatan Jambi Luar Kota.

3.5.2 Sampel

Sekaran & Bougie (2019) menyatakan bahwa sampel merupakan sub kelompok atau sebagian dari populasi. metode yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*) dengan jenis pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (*judgment sampling*).

Sekaran & Bougie (2019) menyatakan bahwa *judgment sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan keahlian orang yang sesuai dengan subjek yang diteliti, sehingga metode ini digunakan jika jumlah atau kategori orang tertentu memiliki informasi yang dicari terbatas. Di Kecamatan Jambi Luar Kota terdapat 19 desa dan terdapat 1 kelurahan yaitu kelurahan Pijoan dan setiap desa diambil 3 orang Aparatur Desa yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini.

Aparatur Desa tersebut yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Kaur keuangan Desa Desa. Sehingga populasi dalam penelitian ini berjumlah 57 orang.

3.6 Definisi Konseptual Dan Operasional Variabel

3.6.1 Definisi Konseptual Variabel

Sekaran & Bougie (2019) menyatakan bahwa variabel penelitian adalah segala yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Dalam hal ini variabel dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Variabel Dependen (Y)

Menurut Sekaran & Bougie (2019) Variabel dependen juga biasa disebut sebagai variabel kriteria, output dan konsekuen. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan variabel dependen yaitu Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. Akuntabilitas merupakan wujud dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik/berkala).

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Menurut Yulianti dkk., (2018) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah Pengelolaan keuangan desa (APBDesa) yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang telah dipercayakan sebagai pelaksanaan kewajiban kepala desa dalam rangka pencapaian tujuan desa. Akuntabilitas diharapkan mampu memperbaiki kualitas kinerja pemerintahan desa sehingga pengelolaan dana desa menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat. Kepercayaan inilah yang akan mengurangi tingkat penyimpangan dana desa

sehingga masyarakat desa dapat diberdayakan menjadi masyarakat mandiri dan pada akhirnya menjadi desa mandiri.

2. Variabel Independen (X)

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan variabel independen yaitu Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal dan Peran Perangkat Desa.

a. Kompetensi

Kompetensi aparatur adalah kemampuan yang harus dimiliki aparatur berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya Adha Inapty & Martiningsih (2016). Kompetensi adalah kemampuan melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan, didukung sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia Nomor 108 tahun 2017 tentang kompetensi pemerintahan. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negera, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Aparatur Sipil Negera tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

b. Sistem Informasi Akuntansi (SIA).

Dapat diartikan adalah catatan dan laporan koordinasi yang menyediakan informasi keuangan desa yang dibutuhkan oleh pemerintah desa atas memudahkan pengelolaan dana desa. Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan-kumpulan dari sub-sub sistem atau komponen fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengelola data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan (Azhar, 2013).

c. Sistem Pengendalian Internal merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional

perusahaan atau organisasi tertentu. Penggunaan sistem pengendalian internal untuk mengarahkan operasi perusahaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem. Peran Perangkat Desa yaitu bagaimana keterlibatan perangkat desa dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada di desa tersebut. Selain berperan dalam menjalankan roda pemerintahan perangkat desa juga memiliki peran dalam pengelolaan alokasi dana desa yang cukup besar.

Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Menurut PP No. 60 Tahun 2008 untuk memberikan keyakinan yang memadai guna tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dengan keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan Pemantauan Pengendalian Intern.

d. Teknologi informasi

menurut Uno dan Lamatenggo (2010) teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan dengan tujuan untuk mengelola suatu data. Pengolahan dalam hal ini adalah memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. adalah seperangkat alat yang membantu dalam bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemrosesan informasi Abdul Karir (2013). Pemanfaatan teknologi informasi akuntansi adalah perilaku/sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk membantu mempermudah dalam proses penyusunan laporan keuangan desa dan meningkatkan kinerja.

3.6.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah batasan pengertian tentang variabel penelitian yang didalamnya sudah mencerminkan indikator- indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel yang bersangkutan. Berdasarkan variabel-variabel dalam penelitian ini, akan dirumuskan kedalam masing-masing indikator yang merupakan ciri-ciri dari variabel tersebut. Operasionalisasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Operasional Dimensi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran dan No.Item
Kompetensi Aparatur Desa (X1)	Berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia Nomor 108 tahun 2017 tentang kompetensi pemerintahan. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negera, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Aparatur Sipil Negera tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.	(Nurkhasanah, 2019)	Ordinal
		1. Pengetahuan	1-2
		2. Keterampilan	3-4
		3. Sikap	5-6
Sistem informasi Akutansi (X2)	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.	Baridwan (2015)	Ordinal
		1. pengumpulan data,	1a
		2. pemrosesan data, pengendalian	2a
		3. pengamanan data, pemanajemenan data,	3a
	4. pengadaan informasi.	4a	
Sistem Pengendali	Berdasarkan Nomor 13 tahun 2019 Sistem Pengendalian	Lathtifah Nurul (2021)	Ordinal

an Internal (X3)	Intern Prinsip Umum Penyelenggaraan SPIP Terdapat beberapa prinsip umum dalam penyelenggaraan SPIP yaitu: 1. Sistem Pengendalian Intern sebagai proses yang integral dan menyatu dengan instansi atau kegiatan secara terus menerus. 2. Sistem Pengendalian Intern dipengaruhi oleh manusia. 3. Sistem Pengendalian Intern memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak dan 4. Sistem Pengendalian Intern diterapkan sesuai dengan kebutuhan, ukuran, kompleksitas, sifat, tugas, dan fungsi instansi pemerintah.	1. lingkungan pengendalian	1-2
		2. penilaian risiko	3-4
		3. Kegiatan pengendalian	5-6
		4. informasi dan komunikasi	7-8
		5. pemantauan pengendalian	9
Penerapan Teknologi Informasi (X4)	Pemanfaatan teknologi informasi akuntansi adalah perilaku/sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk membantu mempermudah dalam proses penyusunan laporan keuangan desa dan meningkatkan kinerja. Sedangkan yang tertuang pada Peraturan Perundang-undangan RI, Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi	Abdul Kadir 2013	Ordinal
		1. Perangkat keras (<i>hardware</i>) 2. Perangkat lunak (<i>software</i>) atau program	1
		3. Prosedur	2-5
		4. Orang	
		5. Basis data (<i>database</i>)	
		6. Jaringan komputer dan komunikasi data.	6-7
Akuntabilitas	Akuntabilitas pengelolaan Dana	Yulianti (2018)	Ordinal

Dana Desa (Y)	Desa menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 Kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatannya terkait dengan pengelolaan dana desa. Menurut Mustofa (2012). Dimensi Akuntabilitas memiliki 3 (tiga) jenis yaitu: 1. Akuntabilitas keuangan 2. Akuntabilitas manfaat 3. Akuntabilitas prosedural	1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum.	1-3
		2. Akuntabilitas proses.	4-6
		3. Akuntabilitas program.	7-9
		4. Akuntabilitas kebijakan.	10-12

Sumber : Diolah untuk penelitian

3.7 Teknik Skala Pengukuran

Penelitian ini menggunakan pengukuran *skala likert* yaitu skala pengukuran yang memungkinkan responden untuk merengking seberapa kuat mereka siap terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Sekaran & Bougie (2019) menyatakan bahwa kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya dimana responden akan mencari jawaban mereka. Kuesioner yang digunakan peneliti adalah kuesioner yang diberikan secara langsung. Jawaban kuesioner menggunakan *Skala likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang dengan skoring :

Tabel 3. 2
Instrumen Skala Likert

Instrumen Skala Likert No	Pernyataan	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Cukup Setuju (KS)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : diolah peneliti 2022

3.8 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara apa yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Peneliti menggunakan metode kuesioner dalam penelitian ini. Sekaran & Bougie (2019) menyatakan bahwa kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya dimana responden akan mencari jawaban mereka. Kuesioner yang digunakan peneliti adalah kuesioner yang diberikan secara langsung. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan menggunakan Observasi dengan mengamati langsung organisasi yang akan dijadikan objek penelitian dan metode survey dengan menggunakan perangkat kuesioner yang ditujukan pada para responden. Format kuesioner terdiri dari dua bagian utama, bagian pertama menyangkut pertanyaan-pertanyaan umum mengenai karakteristik dari para responden, seperti data mengenai jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan lainnya, dan bagian kedua berisi pertanyaan mengenai masalah pokok penelitian.

3.9 Teknik Analisis dan Uji Hipotesis

Penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik yang menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan adalah pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis dengan menggunakan *Statistical Package for Social Science* (SPSS) 24.

3.10 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrument kuesioner, yang bertujuan agar data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

3.10.1 Pengujian Validasi

Sekaran & Bougie (2019) menyatakan bahwa uji validitas adalah uji tentang seberapa baik suatu instrumen yang dikembangkan mengukur konsep tertentu yang ingin diukur. Uji validitas ini berkaitan dengan keandalan kuesioner, yang mana sebuah kuesioner diharapkan mampu mengukur konstruk, atau variabel sesuai dengan indikator yang disusun, jika ternyata variabel tersebut tidak dapat

diukur maka kuesioner/ Pernyataan kuesioner tersebut tidak valid. Ghazali (2011) pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *pearson correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor.

Kriteria valid atau tidak adalah jika korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikan dibawah 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid, dan jika korelasi skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikan diatas 0,05 maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.

3.10.2 Pengujian Reliabilitas

Sekaran & Bougie (2019) menyatakan bahwa uji reliabilitas ini terkait dengan tingkat stabilitas dan konsistensi kuesioner, artinya kuesioner yang disusun mampu memberikan jawaban yang sama dari waktu ke waktu apabila diajukan kembali ke responden yang sama. Kuesioner yang apabila memberikan jawaban yang berubah-ubah dengan sampel yang sama maka akan dianggap tidak reliabel.

3.10.3 Koefisien Determinasi

Menurut Ghazali, (2018) koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel.

3.11 Pengujian Asumsi Klasik

Suatu model regresi yang baik adalah model regresi yang memenuhi asumsi klasik yaitu asumsi normalitas dan asumsi heteroskedastisitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian asumsi normalitas dan asumsi heteroskedastisitas sebelum dilakukan pengujian hipotesis Ghazali (2018). Berikut penjelasan uji klasik yang akan dilakukan di penelitian ini :

3.11.1 Uji Asumsi Normalitas

Menurut Imam Ghozali (2018) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu dengan melihat probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Selain itu Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah metode *Kolmogorov Smirnov Test*. Jika signifikan $> 0,05$ maka variabel berdistribusi normal dan sebaliknya jika signifikan $< 0,05$ maka variabel tidak berdistribusi normal, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Signifikan $> 0,05$ maka variabel berdistribusi normal.
- 2 Signifikan $< 0,05$ maka variabel tidak berdistribusi normal.

3.11.2 Uji Asumsi Multikolinieritas

Menurut Imam Ghozali (2018) bahwa Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent), Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independent. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Sedangkan Variabel *ortogonal* adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Tes ini juga dilakukan untuk menghindari kebiasaan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen pada uji parsial. Jika nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) diantara 1–10 maka tidak terjadi multikolinearitas atau dengan kata lain jika nilai tolerance $\leq 0,1$ atau nilai VIF ≥ 10 maka dapat dikatakan multikolinearitas.

3.11.3 Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Kemudian Iman Ghozali (2018) menyatakan bahwa ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y

prediksi – Y sesungguhnya) yang telah distudentized. Adapun dasar analisisnya sebagai berikut :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.12 Analisis Regresi Linier Berganda

Ghozali (2018) menyatakan bahwa regresi linear berganda adalah pengembangan dari regresi sederhana, yaitu sama-sama alat yang dapat digunakan untuk memprediksi permintaan di masa yang akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas dan satu variabel tidak bebas. Perbedaan penerapan metode ini hanya terletak pada jumlah variabel bebas yang digunakan. Penerapan metode regresi berganda jumlah variabel bebas yang digunakan lebih dari satu yang mempengaruhi satu variabel tidak bebas. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik yakni analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa (X1), sistem informasi akuntansi (X2), sistem pengendalian internal (X3), pemanfaatan teknologi informasi (X4), terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa(Y). Rumus regresi yang digunakan adalah : $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

X1 = Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa

X2 = Sistem informasi akuntansi

X3 = Sistem Pengendalian Internal

X4 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

α = konstanta

β = koefisien arah regresi

e = *error*

3.13 Teknik Pengujian Hipotesis

3.13.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t (Uji Parsial), yaitu untuk menguji apakah variabel independen, secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Adapun kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. Nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

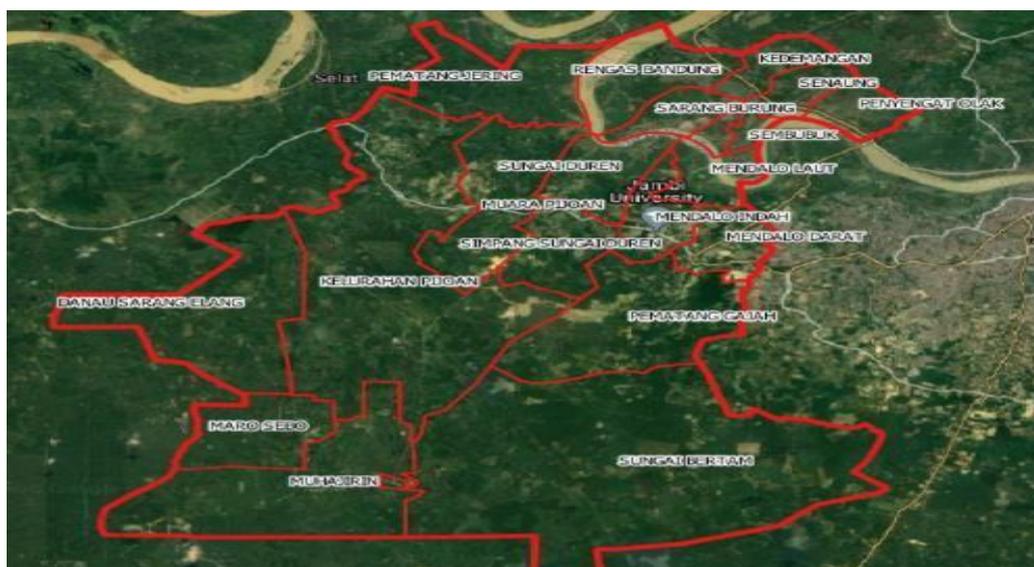
GAMBARAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Jambi Luar Kota

4.1.1 Keadaan Geografis

Kecamatan Jambi Luar Kota merupakan salah satu dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Jambi Luar Kota meliputi satu kelurahan dan 19 desa Kecamatan Jambi Luar Kota terletak diantara $103^{\circ}30'0''$ BT - $104^{\circ}0'0''$ dan $1^{\circ}30'0''$ - $2^{\circ}0'0''$ L dengan batas-batas wilayah adalah :

- a. Utara : Kecamatan Sekernan
- b. Timur : Kecamatan Mestong
- c. Selatan: Kecamatan Mestong
- d. Barat : Kecamatan Pelayung



Gambar 4. 1 Peta Kecamatan Jambi Luar Kota

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Muaro Jambi 2021

4.1.2 Wilayah Pemerintahan Kecamatan Jambi Luar Kota

Kecamatan jambi luar kota merupakan salah satu kecamatan yang ada di provinsi jambi. Kecamatan ini terdiri dari 20 desa/kelurahan yaitu Simprang Sungai Duren, Sungai Duren, Simprang Limo, Sungai Bertam, Kademangan, Sembubuk, Maro Sebo, Mendalo Indah, Mendalo Darat, Mendalo Laut, Muaro

Pijoan, Muhajirin, Pematang Gajah, Pematang Jering, Kel.Pijoan, Rengas Bandung, Senaung, Sarang Burung, Penyengat Olak, dan Danau Sarang Elang

4.1.3 Luas Wilayah dan Jarak Tempuh dari Pusat Pemerintah Desa/Kelurahan dengan Ibu Kota Jambi Luar Kota

Tabel 4. 1
Luas Wilayah dan Jarak Tempuh Pusat Pemerintahan

Desa/Kelurahan	Luas Area (Km2)	Jarah Tempuh (Km2)
Kel. Pijoan	92,44	-
Muaro Pijoan	15,5052437	5
Simp. Sei. Duren	6,53456469	7
Sungai Duren	7,95884694	8
Pematang Jering	18,6050967	13
Mendalo Darat	7,72646424	12
Penyengat Olak	37,4789338	15
Senaung	43,4118924	16
Kedemangan	75,6607268	21
Rengas Bandung	10,0674246	24
Sembubuk	25,8404121	19
Mendalo Laut	34,5848076	23
Sarang Burung	31,5230261	23
Danau Sarang Elang	5,8738558	18
Simpang Limo	7,04862696	20
Sungai Bertam	7,75212364	29
Muhajirin	35,1429605	21
Maro Sebo	7,2353154	36
Mendalo Indah	6,49072925	9
Pematang Gajah	30,3316771	16

Sumber: Kecamatan Jambi Luar Kota dalam Angka 2021

4.1.4 Penduduk Kecamatan Jambi Luar Kota

Badan Pusat Statistika (BPS) menyebutkan bahwa Penduduk Kecamatan Jambi Luar Kota tahun 2021 tercatat sebanyak 69.075 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 35.311 jiwa dan penduduk perempuan 33.764 jiwa

Perbandingan penduduk laki-laki dan penduduk perempuan (sex ratio) adalah 105 yang berarti bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan atau dari 105 jiwa penduduk laki-laki terdapat 100 jiwa perempuan.

4.1.5 Fasilitas Umum dan Infrastruktur

- | | |
|--|--|
| <p>A. Fasilitas Pendidikan Negeri dan Swasta Kecamatan Jambi Luar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah Dasar (SD) 20 unit 2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 13 unit 3. Sekolah Menengah Atas (SMA) 5 unit 4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 unit 5. Perguruan Tinggi 3 Unit (Universitas Jambi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, STITEKNAS Jambi). | <p>B. Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Ibadah Kecamatan Jambi Luar Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poliklinik 3 unit 2. Puskesmas 3 unit 3. Puskesmas pembantu 11 unit 4. Apotek 3 unit 5. Masjid 74 unit 6. Mushala 82 unit 7. Gereja Protestan 1 unit |
|--|--|

4.1.6 Bidang Pertanian

Kelompok sayur-sayuran yang banyak ditemukan di Kecamatan Jambi Luar Kota antara lain: kacang panjang, cabai besar, terung, ketimun, dan lainlain. Selain itu, ada pula tanaman biofarmaka, atau sering disebut tanaman obat. Sebagian besar lahan pertanian di Kecamatan Jambi Luar Kota digunakan untuk perkebunan yang luasnya mencapai 16.320 hektar. Area ini lebih banyak digunakan untuk perkebunan karet dan kelapa sawit.

4.1.7 Komunikasi, Transportasi dan Sarana Ekonomi

Sarana komunikasi dan transportasi yang baik akan mendukung perkembangan ekonomi suatu wilayah. Jumlah menara BTS di Kecamatan Jambi Luar Kota ada 35 Menara yang tersebar di beberapa desa. Kondisi sinyal operator

seluler di sebagian besar wilayah Kecamatan Jambi Luar Kota sudah cukup baik. Sebanyak 19 desa semua sudah terjangkau dengan kualitas baik.

Sedangkan Keberadaan sarana ekonomi di wilayah Kecamatan akan mendukung pembanguinan dan perkembangan wilayah. Kecamatan Jambi Luar Kota mempunyai pasar sebanyak 5 pasar yang berada antara lain di Desa Kedemangan, Sembubuk, Simpang Limo, Muhajirin dan Danau Sarang Elang.

4.2 Gambaran Umum penelitian

4.2.1 Pengembalian Kuesioner

Sesuai dengan penempatan sampel, maka peneliti menyebarkan koesioner kepada 57 responden. penyebaran koesioner dilakukan pada setiap desa pada kecamatan jambi luar kota. dari penyebaran koesioner yang telah dilakukan semuanya dapat dikumpulkan dan telah diisi oleh responden. Jumlah penyebaran koesioner serta jumlah koesioner yang kembali dan diolah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 2
Tingkat Pengembalian Kuesioner

Uraian	Keterangan
Sampel yang dipilih	57
Jumlah koesioner yang di sebar	57
Jumlah koesioner yang kembali	52
Jumlah koesioner yang tidak kembali	5
Kuesioner yang tidak dapat digunakan	-
Jumlah koesioner yang diolah	52
Persentase	91,22 %

Sumber: Diolah peneliti 2022

4.3 Deskripsi Responden

Karakteristik responden dilakukan untuk mendiskripsikan klasifikasi responden yang digunakan dalam penelitian yaitu jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir. Untuk jumlah responden yaitu 57 orang. Namun koesioner yang kembali hanya 52 orang. yang mencangkup kepala desa, sekretaris desa, dan

Kaur keuangan desa. Berikut ini karakteristik responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

4.3.1 karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin:

Berikut adalah tabel karakteristik responden berdasarkan jenjang jenis kelamin:

Tabel 4. 3
karakteristik responden berdasarkan jenjang jenis kelamin

Jenis kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
Laki- laki	38	73,1
perempuan	24	26,9
jumlah	52	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Oleh Penulis, 2022

Hasil data yang diperoleh dari tabel 4.3 jumlah responden berdasarkan jenis kelamin, terdiri atas laki-laki sebanyak 38 responden atau 73,1% sedangkan 24 responden atau 26,9% lainnya adalah perempuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Responden di dominasi oleh Laki-laki dibandingkan Perempuan.

4.3.2 Karakteristik Responden berdasarkan Usia

Berikut adalah tabel karakteristik responden berdasarkan usia :

Tabel 4. 4
karakteristik responden berdasarkan usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase (%)
21 - 30 Tahun	2	3,84
31 – 40 Tahun	27	51,9
41 – 50 Tahun	21	40,4
>50Tahun	2	3,84
Jumlah	52	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Oleh Penulis, 2022

Dari Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden berdasarkan usia yaitu 21 - 30 Tahun sebanyak 2 responden atau 3,84 %, sedangkan Usia 31 – 40 Tahun sebanyak 27 Responden atau 51,9 % , kemudian usia 41 – 50 Tahun sebanyak 21 responden atau 40,4%, serta usia >50 Tahun sebanyak 2 responden atau 3,84 % Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan usia didominasi dengan Usia 31 – 40 Tahun sebanyak 27 Responden atau 51,9 %

4.3.3 Karakteristik responden berdasarkan pendidikan

Berikut adalah tabel karakteristik responden berdasarkan jenjang pendidikan:

Tabel 4. 5
karakteristik responden berdasarkan jenjang pendidikan

Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
SMA/Sederajat	22	42,31
D3	7	13,5
S1	23	44,2
Jumlah	52	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Oleh Penulis, 2022

Dari Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa karakteristik responden dilihat dari jenjang pendidikan terbanyak adalah S1 sebanyak 23 individu atau 44,2 %, kemudian jenjang pendidikan SMA sebanyak 22 individu atau 42,31%, serta jenjang pendidikan D3 sebanyak 7 individu atau 13,5 %. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan jenjang pendidikan didominasi dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 23 individu atau 44,2%.

4.4 Uji Instrumen Penelitian

4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah data yang telah di dapat setelah penelitian merupakan data yang valid dengan alat ukur kuesioner. Nilai validitas dapat dilihat dengan kriteria jika r hitung lebih besar dari pada angka r tabel maka instrument dinyatakan valid dan sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari

angka r tabel maka instrument dinyatakan tidak valid. Adapun pengujian validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 6
Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas (Y)

Dimensi	Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum	Indikator 1	0,715	0,2732	Valid
	Indikator 2	0,541	0,2732	Valid
	Indikator 3	0,666	0,2732	Valid
Akuntabilitas Proses	Indikator 4	0,731	0,2732	Valid
	Indikator 5	0,659	0,2732	Valid
	Indikator 6	0,583	0,2732	Valid
Akuntabilitas Program	Indikator 7	0,672	0,2732	Valid
	Indikator 8	0,445	0,2732	Valid
	Indikator 9	0,660	0,2732	Valid
Akuntabilitas Kebijakan	Indikator 10	0,504	0,2732	Valid
	Indikator 11	0,634	0,2732	Valid
	Indikator 12	0,427	0,2732	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 24 Oleh Penulis, 2022

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa 12 item pertanyaan pada kuesioner variabel Mengenai Akuntabilitas dinyatakan valid setelah di uji di SPSS 24 yang mana nilai r hitung lebih besar dari angka r tabel.

Tabel 4. 7
Hasil Uji Validitas Kompetensi (X1)

Dimensi	Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Pengetahuan (<i>Knowledge</i>)	Indikator 1	0,502	0,2732	Valid
	Indikator 2	0,572	0,2732	Valid
Kemampuan (<i>Skill</i>)	Indikator 3	0,598	0,2732	Valid
	Indikator 4	0,741	0,2732	Valid
Sikap (<i>Attitude</i>)	Indikator 5	0,534	0,2732	Valid
	Indikator 6	0,588	0,2732	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 24 Oleh Penulis, 2022

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa 16 item pertanyaan pada kuesioner variabel Mengenai Akuntabilitas dinyatakan valid setelah di uji di SPSS 24 yang mana nilai r hitung lebih besar dari angka r tabel.

Tabel 4. 8
Hasil Uji Validitas Sistem Informasi Akuntansi (X2)

Dimensi	Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
pengumpulan data	Indikator 1	0,741	0,2732	Valid
pemrosesan data	Indikator 2	0,803	0,2732	Valid
Pengamanan data	Indikator 3	0,584	0,2732	Valid
Pengadaan informasi.	Indikator 4	0,606	0,2732	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 24 Oleh Penulis, 2022

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa 4 item pertanyaan pada kuesioner variabel Mengenai Akuntabilitas dinyatakan valid setelah di uji di SPSS 24 yang mana nilai r hitung lebih besar dari angka r tabel.

Tabel 4. 9
Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern (X3)

Dimensi	Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Lingkungan Pengendalian	Indikator 1	0,540	0,2732	Valid
	Indikator 2	0,683	0,2732	Valid
Penilaian Risiko	Indikator 3	0,649	0,2732	Valid
	Indikator 4	0,510	0,2732	Valid
Kegiatan Pengendalian	Indikator 5	0,603	0,2732	Valid
	Indikator 6	0,740	0,2732	Valid
Informasi dan Komunikasi	Indikator 7	0,281	0,2732	Valid
	Indikator 8	0,726	0,2732	Valid
Pemantauan Pengendalian Internal	Indikator 9	0,506	0,2732	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 24 Oleh Penulis, 2022

Berdasarkan Tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa 9 item pertanyaan pada kuesioner variabel Mengenai Akuntabilitas dinyatakan valid setelah di uji di SPSS 24 yang mana nilai r hitung lebih besar dari angka r tabel.

Tabel 4. 10
Hasil Uji Validitas Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4)

Dimensi	Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Ketersediaan Perangkat	Indikator 1	0,537	0,2732	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indikator 2	0,598	0,2732	Valid
	Indikator 3	0,623	0,2732	Valid
	Indikator 4	0,464	0,2732	Valid
	Indikator 5	0,786	0,2732	Valid
Jaringan Internet	Indikator 6	0,646	0,2732	Valid
	Indikator 7	0,703	0,2732	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 24 Oleh Penulis, 2022

Berdasarkan Tabel 4.10 diatas dapat dilihat bahwa 7 item pertanyaan pada kuesioner variabel Mengenai Akuntabilitas dinyatakan valid setelah di uji di SPSS 24 yang mana nilai r hitung lebih besar dari angka r tabel.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Sekaran & Bougie (2019) menyatakan bahwa uji reliabilitas ini terkait dengan tingkat stabilitas dan konsistensi kuesioner, artinya kuesioner yang disusun mampu memberikan jawaban yang sama dari waktu ke waktu apabila diajukan kembali ke responden yang sama. Kuesioner yang apabila memberikan jawaban yang berubah-ubah dengan sampel yang sama maka akan dianggap tidak reliabel.

Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan SPSS 24 dengan jumlah responden 52 orang. Variable di katakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,06 maka semua item pernyataan dari variabel yang di teliti adalah reliabel. Dan sebaliknya jika nilai *Cronbach Alpha* < 0,06 maka semua item pernyataan dari variabel yang di teliti adalah tidak reliabel. Adapun hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 11
Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Indikator	Nilai Alpha	Ketentuan	Keterangan
Akuntabilitas	12	0,840	>0,6	Reliabel
Kompetensi	6	0,631	>0,6	Reliabel
Sistem informasi akuntansi	4	0,615	>0,6	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	9	0,750	>0,6	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	7	0,742	>0,6	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 24 Oleh Penulis, 2022

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat dilihat bahwa nilai dari *Cronbach Alpha* semua item pertanyaan dari masing-masing variabel yang di teliti yaitu variabel Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa (Y) 12 item pertanyaan, variabel kompetensi (X1) dengan 6 item pertanyaan, variabel sistem informasi akuntansi (X2) 4 item pertanyaan, variabel sistem pengendalian internal (X3) 9 item pertanyaan dan variabel pemanfaatan teknologi informasi (X4) dengan 7 item keseluruhannya bernilai lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini berstatus reliabel.

4.4.3 Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi dalam variabel dependen. Uji ini dilakukan untuk melihat seberapa besar variabel akuntabilitas pemerintah desa dalam Pengelolaan Dana Desa (Y), variabel kompetensi (X1), variabel sistem informasi, variabel sistem pengendalian internal (X3) dan variabel pemanfaatan teknologi informasi (X4) Berikut hasil uji koefisien determinasi (R²):

Tabel 4. 12
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

<i>Model Summary</i>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,915 ^a	0,837	0,823	1,507
a. Predictors: (Constant), kompetensi, SIA, Sistem pengendalian internal, Teknologi informasi				

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 24 Oleh Penulis, 2022

Dari Hasil pengujian pada tabel 4.12 di peroleh nilai koefisien determinasi (*Adjusted R2*) sebesar 0,823. Hal ini berarti variasi naik turunnya variabel akuntabilitas mampu di jelaskan oleh variabel kompetensi, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi sebesar 82,7%, sementara sisanya sebesar 17,3% diterangkan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.5 Analisis Statistik

4.5.1 Analisis Regresi Berganda

Teknik analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis seberapa besar hubungan dan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel dependen yaitu akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa (Y). sedangkan variabel independen yaitu kompetensi (X1), sistem informasi akuntansi (X2), sistem pengendalian internal (X3) dan pemanfaatan teknologi informasi (X4). Uji regresi berganda dengan menggunakan alat uji SPSS 24 yang hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4. 13
Uji Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3,535	4,165		-,849	,400
	Kompetensi	,388	,110	.216	3,519	,001
	Sistem informasi akuntansi	1,257	,169	.514	7,427	,000
	Sistem pengendalian internal	,171	,093	,125	1,852	,070
	Pemanfaatan teknologi	,568	,102	,386	5,595	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas pengelolaan dana desa

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 24 Oleh Penulis, 2022

Berdasarkan tabel 4.13 hasil pengujian diatas maka persamaan regresi linear berganda dapat di ketahui sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = -3,535 + 0,388 \text{ Kompetensi} + 1,257 \text{ SIA} + 0,171 \text{ SPIP} + 0,568 \text{ Teknologi} + e$$

Persamaan regresi diatas dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar -3.535 artinya jika nilai kompetensi (X1), sistem informasi akuntansi (X2), sistem pengendalian internal (X3) dan pemanfaatan teknologi informasi (X4). tidak ada atau nilainya 0, maka akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menurun atau berkurang nilainya sebesar -3.535.
2. Koefisien regresi variabel kompetensi (X1) sebesar 0,388, artinya dan bertanda positif artinya jika variabel kompetensi ditingkatkan sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan peningkatan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa sebesar 38,8%.
3. Koefisien regresi variabel sistem informasi akuntansi (X2) sebesar 1,257 artinya jika terjadi peningkatan sistem informasi akuntansi sebesar 1% maka akan meningkatkan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa sebesar 1,25 %.
4. Koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal (X3) sebesar 0,171 artinya jika terjadi peningkatan sistem pengendalian internal sebesar 1% maka akan meningkatkan akuntabilitas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa sebesar 17,1 %.
5. Koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi informasi (X4) sebesar 0,568 artinya jika terjadi peningkatan pemanfaatan teknologi informasi sebesar 1% maka akan meningkatkan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa sebesar 56.8 %.

4.6 Uji Asumsi Klasik

4.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Pada pengujian normalitas

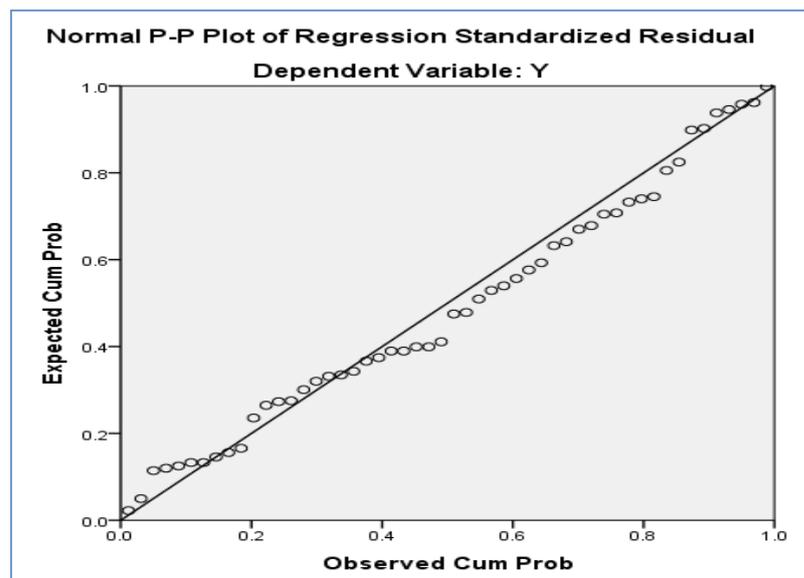
peneliti menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan bantuan program analisis statistik SPSS 24. Adapun hasil pengolahan uji normalitas adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 14
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		52
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1.44711406
<i>Most Extreme Differences</i>	Absolute	,093
	Positive	,093
	Negative	-,066
<i>Test Statistic</i>		,093
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,200 ^{c,d}

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 24 Oleh Penulis, 2022

Uji normalitas dapat dilihat dari grafik normal *Probability Plot* atau grafik *p-plot* dengan penyebaran data disekitar garis diagonal dan hal tersebut menyatakan bahwa residual telah terdistribusikan dengan normal. Sedangkan, uji *Kolmogrov-Smirnov* dapat dikatakan terdistribusi normal ketika nilai signifikan diatas 0,05.



Gambar 4. 2 *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 24 Oleh Penulis, 2022

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa titik – titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan normalitas data telah terpenuhi dan model regresi layak untuk digunakan. Sedangkan, dari tabel 4.14 dapat dilihat dari perhitungan uji statistik yang menggunakan non parametik *Kolmogrov-Smirnov* menyatakan bahwa nilai *Asymp. Sig* sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berdistribusi dengan normal.

4.6.2 Uji Multikolinearitas

Multikolonieritas berarti adanya hubungan linear yang sempurna diantara beberapa atau semua variabel independen yang menjelaskan model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi linear berganda adalah tidak adanya *multikolinearitas*. Uji multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF dan *Tolerance*. Hasil perhitungan dari nilai VIF dan *Tolerance* dengan menggunakan SPSS 24 adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 15
Uji Multikolinearitas

Model		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	VIF
1	(<i>Constant</i>)		
	Kompetensi	0,923	1,083
	Sistem informasi akuntansi	0,725	1,380
	Sistem pengendalian internal	0,760	1,315
	Pemanfaatan teknologi informasi	0,728	1,374

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 24 Oleh Penulis, 2022

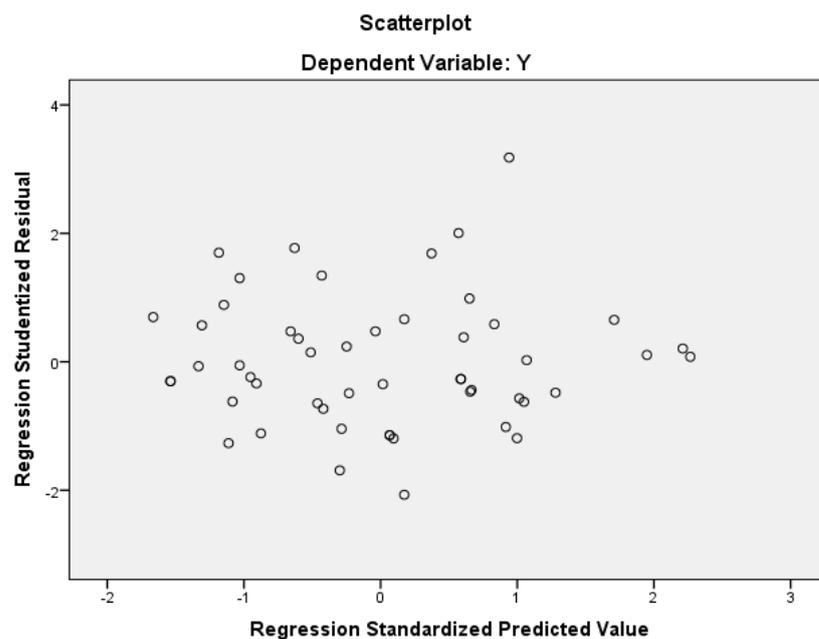
Pedoman dalam mendapatkan keputusan ada tidaknya gejala multikolinearitas yaitu jika nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) diantara 1–10 maka tidak terjadi multikolinearitas atau dengan kata lain jika nilai *tolerance* $\leq 0,1$ atau nilai VIF ≥ 10 maka dapat dikatakan multikolinearitas.

Berdasarkan hasil perhitungan uji multikolinearitas (Tabel 4.15) didapatkan nilai VIF (*variance inflation factor*) dari masing-masing variabel independen adalah kompetensi sebesar 1,083 sistem informasi akuntansi sebesar 1,380 sistem pengendalian internal 1,315 pemanfaatan teknologi informasi 1,374 kurang dari 10 dan nilai *tolerance* yang terbentuk adalah 0,923 0,725 0,760 0,728 diatas 0,1,

maka dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan untuk penelitian selanjutnya dan tidak terdapat multikolinearitas.

4.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari pengamatan ke pengamatan yang lainnya tidak tetap, maka model dinyatakan mengalami gejala heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini dilakukan uji *scatterplot* dengan alat bantu SPSS 24 untuk mengetahui apakah model mengalami gejala heteroskedastisitas atau tidak. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat dari gambar berikut ini:



Gambar 4. 3 Grafik Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 24 Oleh Penulis, 2022

Dari gambar 4.3 didapatkan hasil pengujian bahwa tidak adanya memperlihatkan sebaran yang memiliki pola (sebaran terjadi secara acak) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

4.7 Uji Hipotesis

4.7.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui nilai signifikansi pengaruh variabel bebas secara individual (parsial) terhadap variabel terikat. Adapun hasil pengujian sebagai berikut:

Tabel 4. 16
Uji Parsial (Uji t)

Model		t	Sig.
1	(Constant)	-.849	0,400
	Kompetensi	3,519	0,001
	Sistem informasi akuntansi	7,427	0,000
	Sistem pengendalian internal	1,852	0,070
	Pemanfaatan teknologi	5,595	0,000
Dependent Variable: akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa			

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 24 Oleh Penulis, 2022

Berdasarkan tabel 4.16 dengan bantuan program analisis statistik SPSS 24, dapat dikatakan bahwa hasil uji hipotesis yang dilakukan dapat di peroleh:

1. Kompetensi (X1) Pada tabel diatas didapatkan nilai signifikansi (sig) sebesar 0,001 hal ini menunjukkan bahwa kompetensi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan dimana nilai (sig) $0,001 < 0,05$ artinya H1 diterima.
2. Sistem informasi akuntansi (X2) Pada tabel diatas didapatkan nilai signifikansi (sig) sebesar 0,000 hal ini menunjukkan bahwa Sistem informasi akuntansi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan dimana nilai (sig) $0,000 < 0,05$ artinya H2 diterima.
3. Sistem pengendalian internal (X3) Pada tabel diatas didapatkan nilai signifikansi (sig) sebesar 0,070 hal ini menunjukkan bahwa Sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan dimana nilai (sig) $0,070 > 0,05$ artinya H3 ditolak.
4. Pemanfaatan teknologi informasi (X4) Pada tabel diatas didapatkan nilai signifikansi (sig) sebesar 0,000 hal ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan

teknologi informasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan dimana nilai (sig) $0,000 < 0,05$ artinya H4 diterima.

4.8 Pembahasan Penelitian

4.8.1 Pengaruh kompetensi Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel kompetensi mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa sa se-kecamatan Jambi Luar kota. Hal ini dapat dilihat dari level signifikan uji t sebesar $0,001 < 0,05$ artinya hipotesis yang diajukan terbukti bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Mengelola Dana Desa.

Berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia Nomor 108 tahun 2017 tentang kompetensi pemerintahan. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negera, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Aparatur Sipil Negera tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Semakin tinggi kompetensi aparat pengelola keuangan desa maka pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa akan semakin akuntabel dan sebaliknya, semakin rendah kompetensi aparat aparat pengelola keuangan desa maka pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa akan tidak akuntabel. Tingginya kompetensi aparatur desa dapat berasal dari tingkat pendidikan yang ditempuh oleh aparatur desa. Selain itu, kompetensi juga dibentuk melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk melatih aparatur desa dalam pengelolaan dana desa. Melalui upaya ini maka kompetensi aparatur desa akan meningkat dan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan. Pemberian

dana desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh aparat pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintah desa yang baik. Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, memadai dan dapat diandalkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yulianti dkk., (2018) yang mendapatkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian yang sama juga didapatkan Mada, Kalangi, dan Gamaliel (2017) dan Nafadhila dan Yuliasuti Rahayu (2021) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

4.8.2 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel sistem informasi akuntansi mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa pada desa se-kecamatan Jambi Luar kota. Hal ini dapat dilihat dari level signifikan uji t sebesar 0,000 di bawah 0,05 artinya hipotesis yang diajukan terbukti bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah mengelola dana desa.

Dalam hal pengurusan dan pengelolaan dana desa, SIA sangat perlu dilakukan karena akan menentukan bagaimana pengelolaan serta penggunaan dana desa dengan baik. Dalam hal ini, SIA dapat diartikan sebagai catatan dan laporan koordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan desa

yang dibutuhkan oleh pemerintah desa guna memudahkan pengelolaan dana desa yang ada.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes menjadi komponen laporan yang memegang peranan penting dalam akuntansi desa. Sistem Informasi Akuntansi dapat diartikan sebagai catatan dan laporan koordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan desa yang dibutuhkan oleh pemerintah desa guna memudahkan pengelolaan dana desa yang ada.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Siska Wahyuni, Novita Indrawati, Al Azhar L (2018) dan Rusmayanti dkk. (2016) menyatakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pelaporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri dalam hubungan keagenan. Laporan keuangan desa dalam hal ini laporan pertanggungjawaban pemerintah desa menjadi komponen yang sangat penting. Penyelenggaraan akuntansi sesuai dengan standar yang telah diberlakukan dapat membawa dampak positif bagi entitas yang melakukannya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes menjadi komponen laporan yang memegang peranan penting dalam akuntansi desa.

4.8.3 Pengaruh SPIP Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal mempunyai pengaruh positif pada akuntabilitas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa se-kecamatan Jambi Luar kota. Hal ini dapat dilihat dari level signifikan uji t sebesar 0,070 diatas 0,05 artinya hipotesis yang diajukan terbukti bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pemerintah mengelola dana desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Fitri Puspa dan Riky Agung Prasetyo (2020) yang mengatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa sehingga peningkatan Sistem Pengendalian Internal pada Pemerintah Desa dilakukan belum tentu meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Sistem Pengendalian Internal merupakan pengendalian yang dilakukan agar tujuan suatu organisasi tercapai secara efektif dan efisien serta kehandalan dalam pelaporan keuangan guna meminimalisir terjadinya kecurangan Widyatama, et al (2017) Dalam penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan Nomor 13 tahun 2019 Sistem Pengendalian Intern Prinsip Umum Penyelenggaraan SPIP Terdapat beberapa prinsip umum dalam penyelenggaraan SPIP yaitu:

1. Sistem Pengendalian Intern sebagai proses yang integral dan menyatu dengan instansi atau kegiatan secara terus menerus.
2. Sistem Pengendalian Intern dipengaruhi oleh manusia.
3. Sistem Pengendalian Intern memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak dan
4. Sistem Pengendalian Intern diterapkan sesuai dengan kebutuhan, ukuran, kompleksitas, sifat, tugas, dan fungsi instansi pemerintah.

Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendefinisikan Sistem Pengendalian Internal pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Teori agensi pihak *principal* adalah pihak yang memberi mandat kepada pihak lain yaitu *agents* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Penyimpangan dan kebocoran masih banyak ditemukan di dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal dibutuhkan untuk meminimalkan adanya kecurangan dalam suatu sistem. Sistem Pengendalian

Internal dapat memberi keyakinan bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Dengan menerapkan Sistem Pengendalian Internal maka dapat memengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa. Unsur SPIP yang diuji meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan terhadap akuntabilitas.

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan Dwi Fitri Puspa dan Riky Agung Prasetyo (2020) Widyatama, et al (2017) dan Yudiantoro (2017) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Aparatur dari Pemerintah Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

4.8.4 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel sistem informasi akuntansi mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Se-kecamatan Jambi Luar kota. Hal ini dapat dilihat dari level signifikan uji t sebesar 0,000 di bawah 0,05 artinya hipotesis yang diajukan terbukti bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah mengelola dana desa.

Berdasarkan *Stewardship theory, principals* yaitu pemerintah berhak meminta pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa dari Pemerintahan Desa. Oleh karena itu Pemerintah Desa memiliki kewajiban membuat laporan sesuai dengan peraturan serta tidak mengandung unsur yang membingungkan bagi para pemakai laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah desa nantinya akan diberikan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi menjadikan laporan

keuangan disusun secara lebih andal dan relevan. Teknologi informasi mempermudah integrasi pelaporan dari Pemerintah Desa (*steward*) ke Pemerintah (*principals*). Dengan demikian pemanfaatan teknologi informasi akan meminimalisir keterlambatan pelaporan kinerja pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Indraswari & Rahayu, 2021) (Wardani & Andriyani, 2017) (Pahlawan et al., 2020; Yulianti et al., 2018),(Arfiansyah, 2020; Wahyuni et al., 2018) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola keuangan secara akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Dengan sistem yang berkomputerisasi, pelaporan dana desa akan mampu dilakukan dengan cepat dan output laporan keuangannya juga akan lebih handal dibanding dengan pelaporan secara manual.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di dapatkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan gambaran pada variabel-variabel dalam penelitian ini Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Melalui upaya ini maka kompetensi aparatur desa akan meningkat dan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan.
2. Kemudian dari hasil pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa sistem informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam hal pengurusan dan pengelolaan dana desa, SIA sangat perlu dilakukan karena akan menentukan bagaimana pengelolaan serta penggunaan dana desa dengan baik. Dalam hal ini, SIA dapat diartikan sebagai catatan dan laporan koordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan desa yang dibutuhkan oleh pemerintah desa guna memudahkan pengelolaan dana desa yang ada.
3. Berdasarkan hasil analisis data variabel Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga Sistem Pengendalian Internal dapat memberi keyakinan bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Dengan menerapkan Sistem Pengendalian Internal maka dapat memengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi

pemerintah desa.

4. Berdasarkan hasil analisis data variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan demikian dapat diartikan bahwa Penggunaan Informasi Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi menjadikan laporan keuangan disusun secara lebih andal dan relevan.

5.2 Saran

Dari hasil analisis yang telah dikemukakan, maka saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah khususnya kecamatan kecamatan Jambi Luar Kota sebaiknya meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa Pelatihan bagi aparatur Desa selaku Tim Pelaksana Desa tentang manajemen dan administrasi pengelolaan dana desa.
2. Aparatur desa di kecamatan Jambi Luar Kota sebaiknya meningkatkan pemahaman tentang sistem informasi akuntansi sehingga dalam pengelolaan dana desa dapat lebih baik dengan cara mengikuti pelatihan atau diklat tentang penerapan sistem informasi akuntansi.
3. Pemerintah daerah khususnya kecamatan Jambi Luar Kota sebaiknya meningkatkan penerapan sistem pengendalian internal dengan cara dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggungjawaban/SPJ).
4. Pemerintah daerah khususnya kecamatan Jambi Luar Kota sebaiknya meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan teknologi informasi.
5. Penelitian ini menyarankan agar penelitian lanjutan untuk memperoleh data yang relevan pada variabel sistem pengendalian internal terkait pengelolaan dana desa sebaiknya meneliti di eksternal kantor desa. Selanjutnya agar memperoleh dapat memperluas sampel wilayah agar bukti empiris dapat

digeneralisasikan pada wilayah lainnya. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mengembangkan pernyataan-pernyataan dalam kuesioner yang diajukan kepada responden. Penelitian ini juga sangat menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel-variabel penelitian ini serta mengembangkan variabel lain yang relevan dalam menjelaskan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karir, T. (2013) Pengantar Teknologi Informasi. Yogyakarta: Andi.
- Adha Inapty, M. A. F. B., & Martiningsih, R. S. P. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sitem Pengendalian Intern Sebagai *Variabel Moderati*.
- Adiwirya, M. F., & Sudana, I. P. (2015). Akuntabilitas, transparansi, dan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja perangkat daerah kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 11(2), 611-628.
- Andrianto, N. (2007). *Good e-government: transparansi dan akuntabilitas publik melalui e-government*. Indonesia: Bayumedia.
- Aprilya, K.R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gresik. Skripsi. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)*. .
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1).
- Argreshy, N. (2021). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Kanawatu Kabupaten Luwu Timur Di Tengah Pandemi Covid-19. *Journal Economic Bosowa*, 7(004), 188–200.
- Arista, W. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Wonongan Kabupaten Pasuruan). Skripsi. *Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Astuti, I., & Muthali'in, A. (2015). *Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus di Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Azhar, S. (2013). Sistem Informasi Akuntansi. Bandung: Lingga Jaya, 5(1).
- Aziiz, Muhammad Nur, and Sawitri Dwi Prastiti.(2019). “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa.” *Jurnal Akuntansi Aktual* 334.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi. (2021). Kecamatan Jambi Luar Kota Dalam Angka 2021. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi* <https://muarojambikab.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Pemerintah Pusat Perkembangan dana desa selama tahun

2015-2022 <https://www.bps.go.id/indicator/13/1085/3/realisasi-pengeluaran-negara-keuangan-.html>

- Banoet, A., Elim, M. A., & Rantelobo, A. T. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Jaka-Jurnal Jurusan Akuntansi*, 6(1), 09-25.
- Baridwan, Z. (2015). *Sistem informasi akuntansi*. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Dewi, Y. A., Nasfi, N., & Yuliza, M. (2021). *Internal Control System, Utilization Of Accounting Information Technology, On Village Fund Management Accountability. International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(1).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Cetakan kedelapan. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Haliah.(2015). *Quality of Report, is there A Management, and Information Technology Role? Empirical Evidence from West Sulawesi Province, Indonesia. International Journal of Economic Research (IJER)*, 12(1), 177–193.
- Halim, A. dan M. Iqbal. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Tiga. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Handayani, M. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Dilengkapi 100 Soal Latihan Dan Jawaban*. Poliban Press.
- Harryanto, Kartini, Haliah.2014. Budget Process of Local Government in Indonesia. *Review of Integrative Business & Economics Research Vol 3 (2)*,483-501.
- Heriansyah, R. (2018). *Warga Penyengat Olak Lapor ke Kejati Terkait Dugaan Penyimpangan Dana Desa*. [jamberita.com](http://jamberita.com/read/2018/11/02/5205)
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa , Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–15.
- Indriantoro, N. Dan B. Supomo. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. BFPE-Yogyakarta. Yogyakarta.

- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem akuntansi pengelolaan dana desa. *Jurnal ekonomi dan bisnis*, 19(2), 323-340.
- Lamo, Achmad. (2015). *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance*. Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Lathifah, N. (2021). Konsep dan Praktik Sistem Pengendalian Internal. *Insan Cendekia*.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi*
- Mamahit, P., Sabijono, H., & Mawikere, L. (2015). Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Rawat Inap Pada RSUP. Prof. Dr. RD Kandou Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(4).
- Mardiasmo, (2009). Akuntansi Sektor Publik, Andi, Yogyakarta.
- Martini, R. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106–123. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364>.
- Mohamad, I., et al (2015). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Edisi ke dua. Diakses melalui <http://www.lan.go.id>.
- Mustofa, A. I. (2012). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Kabupaten Pematang. *Accounting Analysis Journal*, 1(1).
- Nugrahaningsih, P., & Suranta, S. (2018). IPTEK Bagi Desa Berbasis Sistem Aplikasi Akuntansi Menuju Desa Wirausaha. *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat)*, 7(1).
- Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan, Dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, .
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017 tentang kompetensi pemerintahan.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
- Permendagri No.113 Tahun 2014 Kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019. Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Perundang-Undangan No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya pada pasal 233 ayat 2 Tentang pemerintah Daerah.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281-298.
- Raharjo, M. M. I. (2021). *Pengelolaan Dana Desa*. Bumi Aksara.
- Renyowijoyo, H. M. (2018). Akuntansi Sektor Publik organisasi non laba.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2016). Sistem Informasi Akuntansi Edisi Terjemahan.
- Sarah, S., Taufik, T., & Safitri, D. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat Dan Spi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(4), 330-342.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2019a). *Metode Penelitian untuk Bisnis Buku 1 Edisi 6*. Jakarta : Salemba Empat.
- Santoso, E. B. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur).
- Saragih, R. (2019). Pengelolaan Dana Desa di Muarojambi Banyak Menyimpang. <https://www.beritasatu.com/nasional/563153/pengelolaan-dana-desa-di-muarojambi-banyak-menyimpang>

- Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep *Value For Money* dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan). *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1.
- Sujarweni, V. W. (2015). Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Surat Kabar Metro Jambi ” *Realisasi Dana Desa Semester I 2021 di Jambi Capai 47,02 Persen*”, *Senin 26 Juli 2021*.<https://www.metrojambi.com>.
- Sutrisno, E. (2017). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Kencana.
- Syafaruddin, A. R. A., Kamase, J., & Mursalim, M. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Takalar.
- Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 323-344.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Uno, H. B, dan N. Lamatenggo. (2010). Teknologi komunikasi dan informasi pembelajaran. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wahyuni, S., Indrawati, N., & Al Azhar, A. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi, Dan Kompetensi Aparat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Empiris Desa-Desa Di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal ekonomi*.
- Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88-98.
- Warsita, B.(2011). Landasan Teori dan Teknologi Informasi dalam Pengembangan Teknologi Pembelajaran. *Jurnal Teknodik* 15(1) 84-96.
- Widjajanto, N. (2001). Sistem Informasi Akuntansi. Erlangga.
- Yulianti, Widia, Kamaliah, & Rasuli. (2018). Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, *Internal Control* terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan).



KUESIONER PENELITIAN

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI

Alamat : Jl. Jambi – Muara Bulian No.KM. 15, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Telpon : 0741-583122. Email : humas@unja.ac.

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

Perihal. Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i

Di Tempat : _____

Dengan hormat,

Saya mahasiswa Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Universitas Jambi.

Nama : Rizal Habi Yuda

NIM : C1C018052

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Sedang mengadakan penelitian tentang **“Pengaruh Kompetensi, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa.”**

Dalam menjawab kuesioner yang saya berikan, mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan tidak akan berpengaruh pada diri Bapak/Ibu/Saudara/i karena penelitian ini dilakukan semata-mata untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Besar harapan saya, Bapak/Ibu/Saudara/i bersedia untuk mengisi koesioner ini. Atas kesediaannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya

Peneliti,

Rizal Habi Yuda

1. Data Identitas Responden

1. Nomor Responden :(diisi oleh peneliti)

2. Nama :

3. Jenis Kelamin : *laki-laki/perempuan

4. Usia :

- 21 – 30 tahun
- 31 – 40 tahun
- 41 – 50 tahun
- lainnya

(Berikan tanda cawang/ check-list (√) pada kotak yang tersedia)

5. Pendidikan Terakhir :

- SMA/Sederajat
- D3
- S1
- S2
- Lainnya

6. Jabatan :

2. Profil Desa

1. Nama Desa :

2. Alamat Desa :

3. Nomor Telepon/ HP :

4. Tahun Berdiri :

3. Petunjuk Pengisian Koesioner

Adapun petunjuk pengisian kuesioner adalah sebagai berikut :

1. Kepada Bapak/Ibu/Saudara(i) diharapkan untuk menjawab seluruh pernyataan yang ada dengan jujur dan apa adanya.
2. Berilah tanda (√) pada kolom yang tersedia dan pilih satu alternatif jawaban paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
3. Semakin tinggi tingkat kesetujuan Bapak/Ibu/Saudara(i) pada pernyataan tersebut maka akan semakin tinggi derajat kesesuaian terhadap penelitian ini.
4. Terdapat 5 (lima) alternatif jawaban yang dapat dipilih yaitu sebagai berikut :

mbol	Keterangan	imbol	keterangan
SS	Sangat Setuju	TS	Tidak Setuju
S	Setuju	STS	Sangat Tidak Setuju
KS	Kurang Setuju		

LAMPIRAN KOESIONER

1. Pernyataan Mengenai Kompetensi

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
	Pengetahuan (<i>Knowledge</i>)					
1.	Bapak/ibu sebagai perangkat desa setuju, Pengetahuan menunjang pengelolaan keuangan desa menjadi lebih baik					
2.	Bapak/ibu sebagai perangkat desa setuju, Aparatur pemerintah desa meningkatkan pengetahuannya dengan pelatihan – pelatihan berkaitan dengan pengelolaan keuangan					
	Kemampuan (<i>Skill</i>)					
3.	Bapak/ibu sebagai perangkat desa setuju, Seluruh aparat memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan desa					
4.	Bapak/ibu sebagai perangkat desa setuju, Aparatur pemerintah desa mampu menemukan solusi terhadap kendala dalam bekerja					
	Sikap (<i>Attitude</i>)					
5.	Bapak/ibu sebagai perangkat desa setuju, sebagai aparat desa mempunyai inisiatif untuk mengerjakan pekerjaan yang ada.					
6.	Bapak/ibu sebagai perangkat desa setuju, perangkat desa selalu bekerja dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang pegawai					

2. Pernyataan Mengenai Sistem Informasi Akuntansi

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Bapak, Ibu atau saudara/i yakin akan kemampuan diri sendiri dalam menyelesaikan berbagai permasalahan.					
2.	Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan.					
3.	Pemerintah desa dalam proses pencatatan dilakukan berdasarkan bukti-bukti transaksi yang selanjutnya di catat pada buku yang sesuai dengan					

	transaksi tersebut.					
4.	Laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, dan neraca. serta dilakukan Penyeimbangan saldo debit kredit guna untuk menghindari kesalahan pencatatan sehingga dapat dibuktikan bahwa pencatatan yang dilakukan adalah benar.					

3. Pernyataan Mengenai Sistem Pengendalian Intern

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
	Lingkungan Pengendalian					
1.	Pemerintah desa memiliki struktur organisasi yang jelas dan ada kejelasan tugas dan wewenang					
2.	Pemerintah desa memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran					
	Penilaian Risiko					
3.	Aparatur pemerintah desa melakukan identifikasi dan analisis risiko dalam pencapaian tujuan pemerintah desa					
4.	Aparat pengawas internal cukup memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan dalam pencapaian tujuan pemerintah desa					
	Kegiatan Pengendalian					
5.	Kepala desa selalu melakukan review kinerja yang dibandingkan dengan tolok ukur kinerja					
6.	Adanya pemisahan fungsi dari setiap tugas mengenai kegiatan yang sedang dilakukan					
	Informasi dan Komunikasi					
7.	pemerintah desa telah menyediakan alat pendukung untuk berbagai transaksi dan penyajian laporan keuangan seperti perangkat keras (<i>hardware</i>).					
8.	Pemerintah desa telah mengimplementasikan sistem informasi manajemen pemerintah dalam bentuk sistem aplikasi yang dapat menunjang penyajian laporan keuangan.					
	Pemantauan Pengendalian Internal					
9.	Pemerintah desa selalu melakukan evaluasi tentang kelebihan dan kelemahan serta membuat rekomendasi untuk memperbaiki pengendalian internal.					

4. Pernyataan Mengenai Pemanfaatan Teknologi Informasi

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
Ketersediaan Perangkat Komputer dan Perangkat Lunak						
1.	Telah tersedia perangkat komputer dan perangkat lunak seperti <i>Microsoft Excel</i> , <i>Microsoft Word</i> , dan lainnya untuk mendukung pekerjaan					
Pemanfaatan Teknologi Informasi						
2.	Pengelola keuangan desa menggunakan komputer dalam melaksanakan pekerjaan harian.					
3.	Pemerintah desa tepat waktu dan konsisten dalam menyusun dan melaporkan laporan keuangan desa					
4.	Pemerintah desa memberikan dukungan penuh terhadap penggunaan teknologi informasi.					
5.	Laporan keuangan yang disajikan pemerintah desa telah memuat informasi yang cukup memadai.					
Jaringan Internet						
6.	Tersedia jaringan internet yang lancar dan mendukung pekerjaan harian.					
7.	Jaringan internet yang tersedia telah dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah desa sebagai media komunikasi dan informasi.					

5. Pernyataan Mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum						
1.	Aspek akuntabilitas dalam penyusunan anggaran APBDes menjadi aspek yang penting					
2.	Laporan atas anggaran APBDes dipublikasikan dan dapat di akses oleh masyarakat yang berkepentingan					
3.	Nilai anggaran yang dilaporkan mencerminkan nilai yang sebenarnya					
Akuntabilitas Proses						
4.	Prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecakupan informasi akuntansi					

5.	Proses prosedur akuntansi nya sudah cukup baik					
6.	setiap prosedur yang dijalani oleh setiap aparatur desa tersebut sudah dapat dijalani dengan baik					
	Akuntabilitas Program					
7.	Anggaran desa ditunjukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakat					
8.	Anggaran desa yang sudah ditetapkan sudah merupakan nilai yang memenuhi kebutuhan pembangunan desa					
9.	Disetiap pengeluaran anggaran untuk suatu kegiatan sudah ditetapkan secara proposional					
	Akuntabilitas Kebijakan					
10.	Anggaran desa yang dipertanggungjawabkan adalah anggaran desa tahun berjalan yang telah diselesaikan					
11.	Dalam mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan anggaran desa dilakukan dalam bentuk laporan keuangan					
12.	penyampaian pertanggungjawaban anggaran diagendakan dalam suatu rapat					

Lampiran 2. Tabulasi Data Variabel Penelitian

1. Tabulasi Data Variabel Akuntabilitas Pemerintah Desa (Y)

Mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)													
Responden	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	total
1	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
2	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	50
3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	52
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	54
6	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	51
7	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	59
8	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	50
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
11	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	5	52
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	51
13	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	54
14	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	51
15	5	4	4	4	4	4	4	3	4	5	5	5	51
16	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	48
17	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	54
18	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	51
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	49
20	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	56
21	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
22	4	4	4	3	3	4	4	5	4	4	4	4	47
23	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	5	47
24	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	49
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
26	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	50
27	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	56
28	5	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	55
29	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5	55
30	5	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	4	54
31	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	59
32	5	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	5	54
33	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	54
34	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	56
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	51
36	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	51
37	4	5	5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	54
38	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	53

39	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	53
40	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	51
41	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	50
42	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	53
43	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
44	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	57
45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
46	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	56
47	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	56
48	5	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	55
49	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	48
50	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	5	47
51	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	49
52	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	51

2. Tabulasi Mengenai Kompetensi (X1) Tabulasi mengenai SIA (X2) Tabulasi mengenai SPIP (X3)

Responden	Tabulasi Mengenai Kompetensi (X1)							Tabulasi mengenai SIA (X2)					Tabulasi mengenai SPIP (X3)										
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	TOTAL	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Total	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	Total	
1	4	5	4	4	4	4	25	5	4	4	4	17	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	37
2	4	4	4	5	4	4	25	5	4	4	4	17	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	38
3	4	4	4	5	4	4	25	4	4	5	5	18	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	39
4	5	4	4	4	4	4	25	5	5	5	5	20	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	42
5	5	4	4	4	4	4	25	5	4	5	4	18	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	42
6	4	4	4	4	4	4	24	5	4	4	4	17	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	39
7	5	5	5	4	5	5	29	5	5	4	5	19	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	43
8	5	4	4	4	5	5	27	4	4	4	4	16	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	40
9	4	4	4	4	5	4	25	4	4	3	4	15	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	40
10	4	5	4	4	4	5	26	4	4	4	4	16	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	37
11	4	5	4	4	5	4	26	4	4	4	5	17	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	39
12	4	5	4	4	5	4	26	4	4	4	4	16	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	38
13	5	5	4	4	4	4	26	5	5	5	4	19	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	37
14	4	5	4	4	5	4	26	5	5	4	4	18	4	5	5	4	5	5	4	5	4	4	41
15	5	4	3	4	4	4	24	4	4	3	4	15	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	37
16	4	4	3	3	4	4	22	4	4	3	4	15	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	42
17	5	5	4	4	4	4	26	5	5	5	4	19	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	37
18	4	5	4	4	5	4	26	5	5	4	4	18	4	5	5	4	5	5	4	5	4	4	41
19	4	5	4	4	4	5	26	4	4	4	4	16	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	38
20	4	4	4	4	5	5	26	5	5	4	5	19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
21	4	4	4	4	5	4	25	5	5	4	4	18	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	42
22	5	4	3	4	4	5	25	4	4	5	4	17	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	38
23	4	4	5	4	5	5	27	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
24	4	4	4	3	5	5	25	3	4	4	4	15	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	39

25	4	4	4	3	4	4	23	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
26	4	5	4	3	4	4	24	4	4	4	4	16	4	4	4	5	4	4	4	4	4	37
27	5	5	4	5	4	5	28	5	4	5	5	19	4	5	4	4	4	4	4	4	4	37
28	4	5	4	5	4	5	27	5	5	4	4	18	4	4	4	3	4	4	5	4	5	37
29	5	5	4	5	4	5	28	5	5	5	4	19	4	4	4	4	4	4	5	4	5	38
30	4	5	5	5	4	4	27	5	5	4	4	18	4	4	4	5	5	4	4	5	5	40
31	5	5	5	5	4	4	28	4	5	5	5	19	5	5	5	4	5	5	5	5	5	44
32	4	4	4	5	4	5	26	4	5	5	4	18	5	5	5	5	4	5	5	5	5	44
33	4	5	5	5	5	4	28	5	4	4	5	18	4	4	5	5	4	4	4	4	4	38
34	4	5	5	4	4	4	26	5	5	4	5	19	4	4	4	3	4	4	5	4	5	37
35	4	5	5	4	4	4	26	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	5	4	4	5	38
36	4	4	4	3	3	4	22	5	4	4	4	17	4	4	5	4	5	4	4	4	4	38
37	4	3	4	3	4	3	21	5	5	4	5	19	5	5	5	4	5	4	5	5	5	43
38	4	5	5	4	4	3	25	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	5	5	38
39	4	4	4	4	4	3	23	4	4	4	5	17	5	4	4	4	4	5	5	4	4	39
40	4	4	4	4	4	5	25	3	4	4	5	16	5	4	4	4	5	4	4	4	5	39
41	4	4	4	4	5	5	26	4	4	4	4	16	5	4	4	4	5	4	4	4	5	39
42	5	5	5	5	5	5	30	4	4	4	4	16	5	4	4	4	4	4	5	4	4	38
43	5	4	5	4	5	5	28	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	4	5	5	44
44	5	5	5	5	5	5	30	3	4	5	4	16	5	4	4	5	5	5	5	5	5	43
45	5	5	4	5	5	5	29	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	4	5	5	44
46	4	5	4	5	5	5	28	5	5	4	5	19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
47	4	4	5	5	5	5	28	5	5	4	5	19	2	4	4	4	4	4	5	4	4	35
48	5	5	5	5	5	5	30	4	5	4	5	18	5	4	4	4	5	5	4	4	4	39
49	5	4	5	4	5	4	27	4	4	5	4	17	5	4	4	4	4	4	5	4	4	38
50	5	5	4	4	5	4	27	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
51	5	5	5	5	4	4	28	3	4	4	4	15	4	4	5	4	5	4	5	4	4	39
52	5	4	5	5	4	4	27	5	4	4	4	17	4	5	5	4	5	4	5	4	4	40

3. Tabulasi Data Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4)

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4)								
Responden	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	Total
1	5	4	4	4	4	5	5	31
2	4	5	4	4	4	5	4	30
3	4	5	4	5	4	4	4	30
4	4	4	5	5	4	4	4	30
5	4	4	5	5	4	4	4	30
6	4	4	4	5	4	4	4	29
7	5	5	5	5	5	5	5	35
8	4	5	5	4	4	4	4	30
9	4	5	5	4	5	4	4	31
10	4	4	4	4	4	4	4	28
11	4	4	4	4	5	5	4	30
12	4	4	4	4	4	4	4	28
13	5	4	4	4	4	5	5	31
14	5	4	4	4	4	4	4	29
15	5	4	4	5	5	4	4	31
16	4	4	5	5	4	4	4	30
17	5	4	4	4	4	5	5	31
18	5	4	4	4	4	4	4	29
19	4	4	4	4	4	4	4	28
20	4	4	5	5	4	4	4	30
21	4	4	5	5	4	4	4	30
22	4	4	4	4	3	3	4	26
23	4	4	3	4	3	4	3	25
24	4	4	5	5	4	4	3	29
25	4	4	4	4	4	4	3	27
26	4	4	4	4	4	4	5	29
27	4	4	4	4	4	5	5	30
28	5	5	5	5	5	5	5	35
29	4	5	4	5	4	5	5	32
30	4	5	5	5	5	5	5	34
31	5	5	5	4	5	5	5	34
32	5	4	5	4	5	5	5	33
33	4	4	4	5	5	5	5	32
34	5	5	5	5	5	5	5	35
35	4	5	4	5	4	5	4	31
36	4	5	5	4	4	5	4	31
37	5	5	5	5	5	4	4	33
38	4	5	4	5	5	4	4	31
39	3	4	4	5	5	5	5	31

40	5	5	5	5	4	4	5	33
41	5	5	4	5	4	4	5	32
42	5	4	4	4	4	5	5	31
43	5	5	5	5	5	5	5	35
44	5	5	5	5	4	4	5	33
45	5	4	5	5	5	5	5	34
46	4	4	5	5	4	4	4	30
47	4	4	4	5	4	4	4	29
48	5	4	4	5	4	4	4	30
49	4	4	4	4	3	3	4	26
50	4	4	3	4	3	4	3	25
51	4	4	5	5	4	4	3	29
52	4	5	5	5	5	4	3	31

Lampiran 3. Tabel r

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
41	0.2542	0.3008	0.3536	0.3887	0.4843
42	0.2512	0.2973	0.3496	0.3843	0.4791
43	0.2483	0.2940	0.3457	0.3801	0.4742
44	0.2455	0.2907	0.3420	0.3761	0.4694
45	0.2429	0.2876	0.3384	0.3721	0.4647
46	0.2403	0.2845	0.3348	0.3683	0.4601
47	0.2377	0.2816	0.3314	0.3646	0.4557
48	0.2353	0.2787	0.3281	0.3610	0.4514
49	0.2329	0.2759	0.3249	0.3575	0.4473
50	0.2306	0.2732	0.3218	0.3542	0.4432

A. Distribusi Frekuensi

X1.1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	32	61.5	61.5	61.5
	SS	20	38.5	38.5	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

X1.2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	1	1.9	1.9	1.9
	S	24	46.2	46.2	48.1
	SS	27	51.9	51.9	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

X1.3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	3	5.8	5.8	5.8
	S	33	63.5	63.5	69.2
	SS	16	30.8	30.8	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

X1.4					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	6	11.5	11.5	11.5
	S	29	55.8	55.8	67.3
	SS	17	32.7	32.7	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

X1.5					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	1	1.9	1.9	1.9
	S	29	55.8	55.8	57.7
	SS	22	42.3	42.3	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

X1.6					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	3	5.8	5.8	5.8
	S	28	53.8	53.8	59.6
	SS	21	40.4	40.4	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

X2.1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	4	7.7	7.7	7.7
	S	23	44.2	44.2	51.9
	SS	25	48.1	48.1	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

X2.2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	32	61.5	61.5	61.5
	SS	20	38.5	38.5	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

X2.3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	3	5.8	5.8	5.8
	S	35	67.3	67.3	73.1
	SS	14	26.9	26.9	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

X2.4					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	35	67.3	67.3	67.3
	SS	17	32.7	32.7	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

X3.1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.9	1.9	1.9
	S	25	48.1	48.1	50.0
	SS	26	50.0	50.0	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

X3.2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	37	71.2	71.2	71.2
	SS	15	28.8	28.8	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

X3.3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	32	61.5	61.5	61.5
	SS	20	38.5	38.5	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

X3.4					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	2	3.8	3.8	3.8
	S	39	75.0	75.0	78.8
	SS	11	21.2	21.2	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

X3.5					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	25	48.1	48.1	48.1
	SS	27	51.9	51.9	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

X3.6					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	33	63.5	63.5	63.5
	SS	19	36.5	36.5	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

X3.7					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	30	57.7	57.7	57.7
	SS	22	42.3	42.3	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

X3.8					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	32	61.5	61.5	61.5
	SS	20	38.5	38.5	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

X3.9					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	30	57.7	57.7	57.7
	SS	22	42.3	42.3	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

X4.1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	1	1.9	1.9	1.9
	S	32	61.5	61.5	63.5
	SS	19	36.5	36.5	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

X4.2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	33	63.5	63.5	63.5
	SS	19	36.5	36.5	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

X4.3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	2	3.8	3.8	3.8
	S	27	51.9	51.9	55.8
	SS	23	44.2	44.2	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

X4.4					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	23	44.2	44.2	44.2
	SS	29	55.8	55.8	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

X4.5					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	4	7.7	7.7	7.7
	S	32	61.5	61.5	69.2
	SS	16	30.8	30.8	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

X4.6					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	2	3.8	3.8	3.8
	S	30	57.7	57.7	61.5
	SS	20	38.5	38.5	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

X4.7					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	6	11.5	11.5	11.5
	S	26	50.0	50.0	61.5
	SS	20	38.5	38.5	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

Y.1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	26	50.0	50.0	50.0
	SS	26	50.0	50.0	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

Y.2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	2	3.8	3.8	3.8
	S	24	46.2	46.2	50.0
	SS	26	50.0	50.0	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

Y.3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	32	61.5	61.5	61.5
	SS	20	38.5	38.5	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

Y.4					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	4	7.7	7.7	7.7
	S	38	73.1	73.1	80.8
	SS	10	19.2	19.2	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

Y.5					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	3	5.8	5.8	5.8
	S	38	73.1	73.1	78.8
	SS	11	21.2	21.2	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

Y.6					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	42	80.8	80.8	80.8
	SS	10	19.2	19.2	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

Y.7					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	26	50.0	50.0	50.0
	SS	26	50.0	50.0	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

Y.8					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	2	3.8	3.8	3.8
	S	36	69.2	69.2	73.1
	SS	14	26.9	26.9	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

Y.9					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	35	67.3	67.3	67.3
	SS	17	32.7	32.7	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

Y.10					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	27	51.9	51.9	51.9
	SS	25	48.1	48.1	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

Y.11					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	30	57.7	57.7	57.7
	SS	22	42.3	42.3	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

Y.12					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	16	30.8	30.8	30.8
	SS	36	69.2	69.2	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

Lampiran 4 Uji Validitas Kuesioner

1. Variabel Kompetensi (X1)

Correlations								
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	TOTAL_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.147	.144	.299*	.069	.208	.502**
	Sig. (2-tailed)		.298	.310	.031	.627	.139	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52
X1.2	Pearson Correlation	.147	1	.293*	.369**	.102	.123	.572**
	Sig. (2-tailed)	.298		.035	.007	.473	.387	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52
X1.3	Pearson Correlation	.144	.293*	1	.402**	.248	.030	.598**
	Sig. (2-tailed)	.310	.035		.003	.076	.833	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52
X1.4	Pearson Correlation	.299*	.369**	.402**	1	.148	.323*	.741**
	Sig. (2-tailed)	.031	.007	.003		.296	.019	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52
X1.5	Pearson Correlation	.069	.102	.248	.148	1	.357**	.534**
	Sig. (2-tailed)	.627	.473	.076	.296		.009	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52
X1.6	Pearson Correlation	.208	.123	.030	.323*	.357**	1	.588**
	Sig. (2-tailed)	.139	.387	.833	.019	.009		.000
	N	52	52	52	52	52	52	52
TOTAL_X1	Pearson Correlation	.502**	.572**	.598**	.741**	.534**	.588**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	52	52	52	52	52	52	52
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).								
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).								

2. Variabel Sistem Informasi Akuntansi (X2)

Correlations						
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	TOTAL_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.561**	.147	.205	.741**
	Sig. (2-tailed)		.000	.297	.146	.000
	N	52	52	52	52	52
X2.2	Pearson Correlation	.561**	1	.280*	.376**	.803**
	Sig. (2-tailed)	.000		.044	.006	.000
	N	52	52	52	52	52
X2.3	Pearson Correlation	.147	.280*	1	.186	.584**
	Sig. (2-tailed)	.297	.044		.188	.000
	N	52	52	52	52	52
X2.4	Pearson Correlation	.205	.376**	.186	1	.606**
	Sig. (2-tailed)	.146	.006	.188		.000
	N	52	52	52	52	52
TOTAL_X2	Pearson Correlation	.741**	.803**	.584**	.606**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	52	52	52	52	52
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).						
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).						

3. Variabel Sistem pengendalian Internal Pemerintah (X3)

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	TOTAL_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.146	.247	.193	.226	.346*	-.010	.247	.248	.540**
	Sig. (2-tailed)		.301	.078	.169	.108	.012	.944	.078	.076	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
X3.2	Pearson Correlation	.146	1	.544**	.308*	.443**	.575**	.056	.456**	.142	.683**
	Sig. (2-tailed)	.301		.000	.026	.001	.000	.692	.001	.315	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
X3.3	Pearson Correlation	.247	.544**	1	.298*	.444**	.385**	.043	.350*	.123	.649**
	Sig. (2-tailed)	.078	.000		.032	.001	.005	.762	.011	.385	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
X3.4	Pearson Correlation	.193	.308*	.298*	1	.191	.316*	-.067	.382**	.099	.510**
	Sig. (2-tailed)	.169	.026	.032		.175	.022	.637	.005	.485	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
X3.5	Pearson Correlation	.226	.443**	.444**	.191	1	.490**	-.033	.286*	.123	.603**
	Sig. (2-tailed)	.108	.001	.001	.175		.000	.817	.040	.386	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
X3.6	Pearson Correlation	.346*	.575**	.385**	.316*	.490**	1	.078	.467**	.239	.740**
	Sig. (2-tailed)	.012	.000	.005	.022	.000		.584	.000	.087	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
X3.7	Pearson Correlation	-.010	.056	.043	-.067	-.033	.078	1	.203	.212	.281*
	Sig. (2-tailed)	.944	.692	.762	.637	.817	.584		.149	.131	.044
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
X3.8	Pearson Correlation	.247	.456**	.350*	.382**	.286*	.467**	.203	1	.443**	.726**
	Sig. (2-tailed)	.078	.001	.011	.005	.040	.000	.149		.001	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
X3.9	Pearson Correlation	.248	.142	.123	.099	.123	.239	.212	.443**	1	.506**
	Sig. (2-tailed)	.076	.315	.385	.485	.386	.087	.131	.001		.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
TOTAL_X3	Pearson Correlation	.540**	.683**	.649**	.510**	.603**	.740**	.281*	.726**	.506**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.044	.000	.000	
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Variabel pemanfaatan teknologi informasi (X4)

Correlations									
		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	TOTAL_X4
X4.1	Pearson Correlation	1	.188	.181	-.003	.250	.256	.466**	.537**
	Sig. (2-tailed)		.182	.199	.984	.074	.067	.000	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
X4.2	Pearson Correlation	.188	1	.377**	.274*	.390**	.248	.237	.598**
	Sig. (2-tailed)	.182		.006	.050	.004	.076	.090	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
X4.3	Pearson Correlation	.181	.377**	1	.432**	.483**	.107	.175	.623**
	Sig. (2-tailed)	.199	.006		.001	.000	.449	.216	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
X4.4	Pearson Correlation	-.003	.274*	.432**	1	.357**	-.003	.071	.464**
	Sig. (2-tailed)	.984	.050	.001		.009	.985	.619	.001
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
X4.5	Pearson Correlation	.250	.390**	.483**	.357**	1	.537**	.397**	.786**
	Sig. (2-tailed)	.074	.004	.000	.009		.000	.004	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
X4.6	Pearson Correlation	.256	.248	.107	-.003	.537**	1	.596**	.646**
	Sig. (2-tailed)	.067	.076	.449	.985	.000		.000	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
X4.7	Pearson Correlation	.466**	.237	.175	.071	.397**	.596**	1	.703**
	Sig. (2-tailed)	.000	.090	.216	.619	.004	.000		.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
TOTAL_X4	Pearson Correlation	.537**	.598**	.623**	.464**	.786**	.646**	.703**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	
	N	52	52	52	52	52	52	52	52

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Y.9	Pearson Correlation	.369**	.227	.376**	.408**	.363**	.388**	.369**	.169	1	.478**	.482**	.198	.660**
	Sig. (2-tailed)	.007	.106	.006	.003	.008	.004	.007	.232		.000	.000	.159	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Y.10	Pearson Correlation	.346*	-.036	.189	.313*	.323*	.019	.269	-.059	.478**	1	.422**	.391**	.504**
	Sig. (2-tailed)	.012	.798	.180	.024	.020	.895	.053	.679	.000		.002	.004	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Y.11	Pearson Correlation	.389**	.331*	.363**	.420**	.284*	.274*	.311*	.071	.482**	.422**	1	.234	.634**
	Sig. (2-tailed)	.004	.017	.008	.002	.041	.050	.025	.616	.000	.002		.096	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Y.12	Pearson Correlation	.333*	.028	.270	.234	.123	.114	.167	.057	.198	.391**	.234	1	.427**
	Sig. (2-tailed)	.016	.843	.053	.094	.385	.422	.238	.687	.159	.004	.096		.002
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
TOTAL_Y	Pearson Correlation	.715**	.541**	.666**	.731**	.659**	.583**	.672**	.445**	.660**	.504**	.634**	.427**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.002	
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 5 Uji Reliabel Kuesioner

a. Variabel Kompetensi (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.631	6

b. Variabel Sistem Informasi Akuntansi (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.615	4

c. Variabel Sistem pengendalian Internal Pemerintah (X3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.750	9

d. Variabel pemanfaatan teknologi informasi (X4)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.742	7

e. Variabel Akuntabilitas Pemerintah Desa(Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.840	12

Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

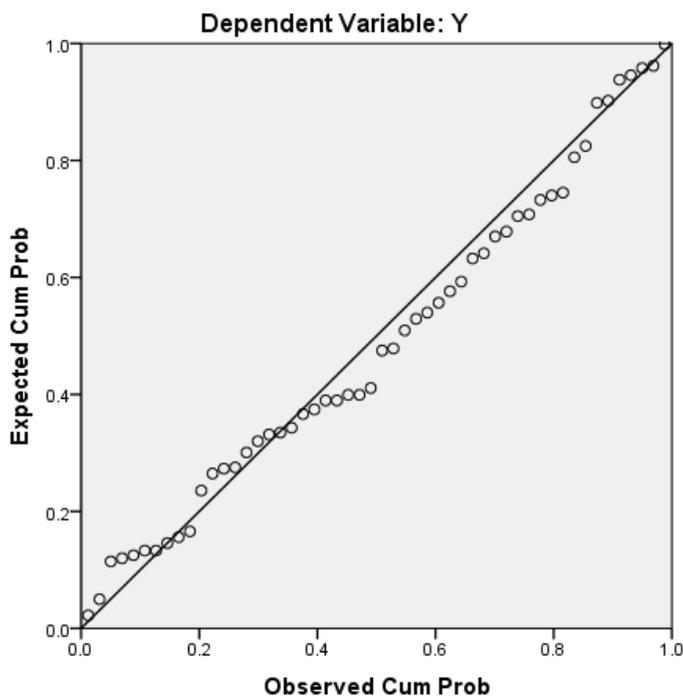
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.44711406
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.093
	Negative	-.066
Test Statistic		.093
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

2. Uji Multikolinearitas

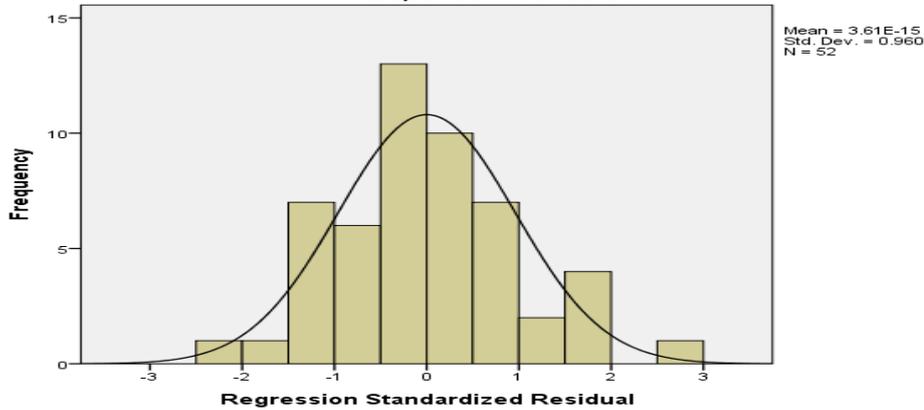
Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-3.535	4.165		-.849	.400		
	X1	.388	.110	.216	3.519	.001	.923	1.083
	X2	1.257	.169	.514	7.427	.000	.725	1.380
	X3	.171	.093	.125	1.852	.070	.760	1.315
	X4	.568	.102	.386	5.595	.000	.728	1.374

a. Dependent Variable: Y

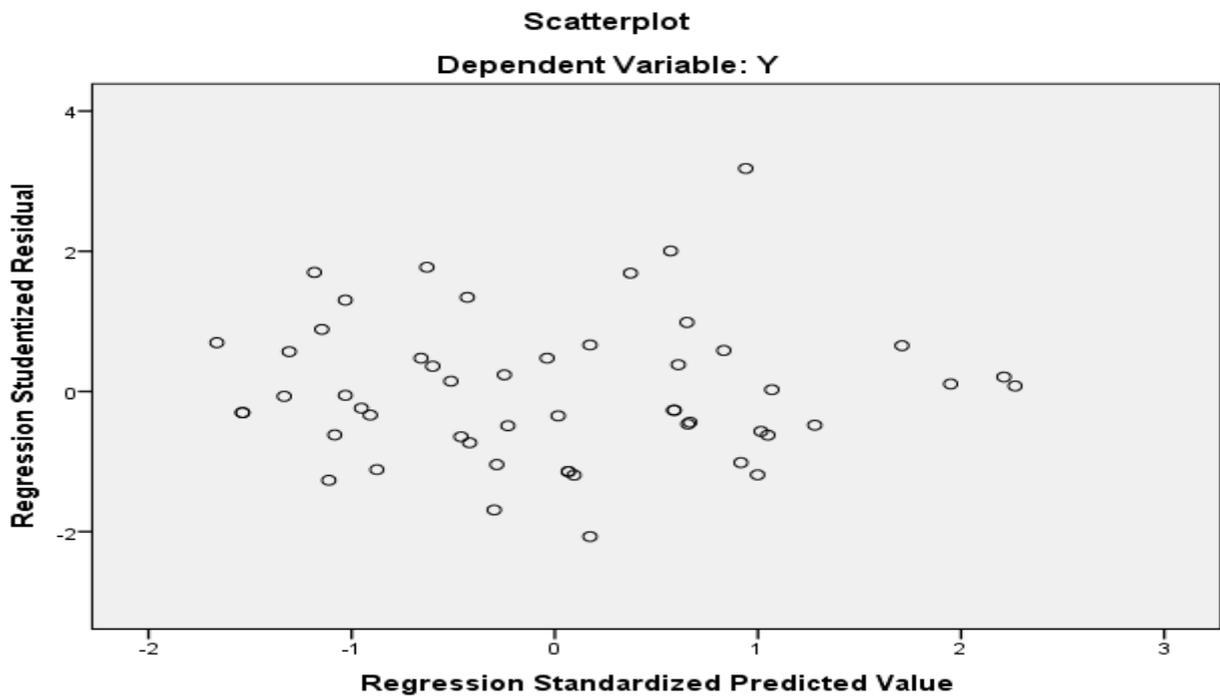
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Histogram
Dependent Variable: Y



3. Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 6 Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3.535	4.165		-.849	.400
	TOTAL_X1	.388	.110	.216	3.519	.001
	TOTAL_X2	1.257	.169	.514	7.427	.000
	TOTAL_X3	.171	.093	.125	1.852	.070
	TOTAL_X4	.568	.102	.386	5.595	.000

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

lampiran 6. Surat Mahasiswa Pelaksanakan Penelitian

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian, KM. 15, Mendalo Indah, Jambi. KodePos 36361
Laman : www.unja.ac.id

Nomor : 3147 /UN21.5/PK.03.08/2022
Hal : Mohon Bantuan Data/Informasi

09 SEP 2022

Yth. Kepala Desa
di Kecamatan Jambi Luar Kota

Dengan hormat, sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir (skripsi) mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi atas:

Nama : Rizal Habi Yuda
NIM : C1C018052
Jurusan : Akuntansi
Semester : IX (sembilan)

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan data/informasi kepada mahasiswa yang bersangkutan guna penyelesaian tugas akhir (skripsi) dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa”.

Demikian disampaikan atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.


Kuasa Dekan,
Dr. Drs. Zulfani, M.P
NIP 196205161987031018/k

surat melakukan penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI**
KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
PIJOAN

Jln. Jambi Muara Bulian Km. 22 **Telp.**

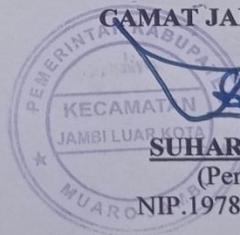
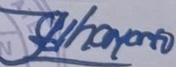
Nomor	: 300 / 11 ⁰ /JLK-Trantib/2022	Pijoan, 15 September 2022
Lampiran	: -	Kepada Yth :
Perihal	: Mohon Bantuan Data dan Informasi	Kepala Desa dan Lurah Se-Kec. Jambi Luar Kota di Tempat

Berdasarkan Surat Dari Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi Nomor 3147/UN21.5/PK.03.08/2020 Perihal mohon bantuan data dan informasi, untuk itu dimohon kepada seluruh Kepala Desa Dan Lurah Sekecamatan Jambi Luar Kota agar dapat membantu nama berikut ;

Nama	: Riza Habi Yuda
Nim	: C1C018052
Jurusan	: Akuntansi
Semester	: IX (Sembilan)
Waktu Penelitian	: 20 Hari

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir dengan judul skripsi “Pengaruh Kompetensi, System Infromasi Akuntansi, System Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa”

Demikian disampaikan atas perhatian dan bantuanya diucapkan terimakasih.


GAMAT JAMBI LUAR KOTA

SUHARYANTO, S.H.I
(Pembina/IVa)
NIP.1978121920061004